

INVESTOR DAILY
INDONESIA

Pemimpin Umum: Rio Abdurachman

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

Berkah (Sesaat) Harga Komoditas

Ekspor Indonesia terpantau tumbuh kuat selama semester I-2025 dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kuartal II yang mencapai 5,12% secara *year on year* (yoy). Pada kuartal II-2025 itu, dengan kontribusi ke produk domestik bruto (PDB) mencapai hingga 22,28%, ekspor tercatat mampu tumbuh 10,67%.

Untuk kontribusi ke PDB, berdasarkan kelompok pengeluaran, ekspor menduduki peringkat ketiga setelah konsumsi rumah tangga (54,25%) dan PMTB atau investasi (27,83%). Sedangkan untuk pertumbuhan,—dengan mengesampingkan impor—eksport mencatatkan pertumbuhan kuartal II-2025, tertinggi dibanding kelompok pengeluaran lain.

Dengan persentase kontribusi ke PDB yang relatif sama, pertumbuhan ekspor kuartal II-2025 itu jauh melampaui periode sebelumnya yakni hanya 6,78% (yoy). Geliat ekspor tersebut diharapkan terus berlanjut memasuki semester II tahun ini, ditopang oleh pengapalan komoditas andalan, yakni minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO), nikel, dan batu bara.

Eksport ketiga komoditas andalan Indonesia itu diharapkan bisa mengompensasi pengapalan barang ke Amerika Serikat (AS) yang kemungkinan turun setelah tarif resiproskal 19% berlaku mulai Kamis (7/8/2025) waktu se-tempat atau Jumat WIB. Dengan demikian, target pertumbuhan ekspor 7% Kementerian Perdagangan dapat tercapai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor barang dan jasa yang tumbuh tinggi sebesar 10,67% pada kuartal II-2025, secara poin persentase berkontribusi 2,43% ke pertumbuhan ekonomi. Ekspor dikurangi impor barang dan jasa masih tumbuh 11,65%, dengan sumbangsih 2,21% terhadap pertumbuhan.

“Untuk itu, upaya memperkuat struktur dan fundamental kinerja ekspor Indonesia seperti diversifikasi pasar ekspor; meningkatkan nilai tambah produk, standar mutu dan sertifikasi internasional, maupun diplomasi ekonomi; serta mendorong kerja sama regional, harus terus digencarkan.

Memasuki semester II-2025, harga CPO masih kuat. Hingga akhir 2025, harga CPO berpotensi menembus 4.500 ringgit, dibandingkan awal tahun sebesar 4.434 ringgit. Harga CPO sempat menyentuh titik terendah pada Mei lalu di level 3.750 ringgit per ton, tapi setelah itu reli dan menyentuh 4.400 per ton pada 13 Agustus 2025. Kini, *support* harga CPO berada di 4.350 ringgit, sedangkan *resistance* 4.480 ringgit.

Adapun ekspor nikel dan turunannya melonjak 13,8% menjadi US\$ 4 miliar pada periode itu. Setelah menyentuh DAS di level US\$ 14.200 per ton pada April, harga nikel dunia mulai merangsek ke level US\$ 15.200 per ton pada Agustus. Sokongan tambahan bisa diharapkan dari batu bara yang harganya bangkit menembus US\$ 100 per ton, setelah terpuruk di level US\$ 90-an pada April lalu.

Dengan posisi Indonesia sebagai penguasa 47% pangsa pasar CPO dunia, komoditas ini bisa diharapkan menjadi bahan bakar pertumbuhan ekspor Indonesia kuartal III maupun IV-2025. Apalagi, Indonesia adalah juga pemain nikel nomor satu dunia dengan pangsa pasar 50% lebih.

Namun demikian, kenaikan harga komoditas-komoditas itu bisa jadi hanyalah berkah sesaat. Secara historis, harga tersebut sering berfluktuasi, tergantung pada sentimen yang mempengaruhi. Untuk itu, upaya memperkuat struktur dan fundamental kinerja ekspor Indonesia seperti diversifikasi pasar ekspor; meningkatkan nilai tambah produk, standar mutu dan sertifikasi internasional, maupun diplomasi ekonomi; serta mendorong kerja sama regional, harus terus digencarkan. □

— POJOK IDE —

Lindungi perempuan adat, Komnas desak RUU Masyarakat Adat disahkan.

Hapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Menko pangan minta Bulog percepat penyaluran beras SPHP lewat pasar.

Pasar ya, bukan ekspor.



— DAILY QUOTE —

“(Anggaran) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini Rp 71 triliun, dan kita cadangkan tambahan Rp 100 triliun. Tahun depan (2026), kalau 82 juta (penerima) akan mendapatkan (MBG), itu lebih dari Rp 300 triliun.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI.

Payment ID dan Ujian Kepercayaan Publik di Era *Post-Truth*

Beberapa minggu terakhir, wacana penerapan Payment ID—yang digadang akan menyederhanakan transaksi digital di Indonesia—mengisi ruang diskusi publik, dari media sosial hingga grup bisnis. Tahap awal akan fokus pada transaksi antarbank dan e-commerce untuk mengukur stabilitas sistem serta respons pengguna. Di titik ini, yang perlu diperhatikan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada publik adalah bagaimana Bank Indonesia (BI) akan memastikan keamanan sistem dan melindungi privasi data konsumen. Sebelum Payment ID di-roll out, perlu ada kejelasan dan penguatan sistem identitas digital yang kuat.



Oleh: Tuhu Nugraha *)

Salah satu inisiatif yang patut dipertimbangkan adalah *IDChain* yang dikembangkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), yakni sistem identitas digital berbasis *blockchain*. Teknologi ini bisa menjadi solusi untuk mitigasi risiko keamanan data dan memperkuat kedaulatan data individu—karena setiap penggunaan data pribadi membutuhkan persetujuan eksplisit dari pemilik data secara *real-time*. Ini memberikan lapisan kendali dan transparansi yang lebih tinggi, khususnya dalam mencegah potensi *witch hunting*, pemantauan transaksional oleh pihak yang berniat jahat, dan ancaman seperti *scam*, pemerasan, atau bahkan tekanan politik.

Tanpa kejelasan tata kelola dan mitigasi risiko yang kuat di era kecerdasan artifisial (AI), kepercayaan publik—terutama dari kelas menengah—bisa terkikis. Meski jumlahnya tidak sebesar populasi keseluruhan, kelas menengah adalah penggerak ekonomi sekaligus penggerak opini dan isu. Kita hidup di era *post-truth*, di mana persepsi kerap mengalahkan realitas, dan persepsi negatif bisa berdampak sistemik pada ekonomi nasional.

Kekhawatiran lain adalah seberapa kuat pertahanan dan keamanan infrastruktur vital ini ketika sistem dikonsolidasikan secara terpusat, yang rentan terhadap serangan siber maupun manipulasi lewat *social engineering*.

Konsep Payment ID sebenarnya cukup sederhana: satu identitas pembayaran untuk semua transaksi lintas platform, terhubung dengan ekosistem perbankan, *fintech*, dan *e-commerce*. India melalui Unified Payments

Interface (UPI) membuktikan bahwa model seperti ini bisa mendorong inklusi keuangan, menurunkan biaya transaksi, dan memacu inovasi lokal. Singapura dengan PayNow merasakan kemudahan serupa. Namun, di Indonesia—dengan kesenjangan literasi digital yang lebar—percepatan seperti ini bisa memicu krisis kepercayaan jika tak diimbangi kesiapan dan komunikasi publik yang memadai.

Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan: mulai dari potensi kebocoran data, penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, kesiapan infrastruktur digital, hingga minimnya edukasi publik menjelang peluncuran. Pelaku industri pun menyoroti biaya integrasi, risiko *downtime*, dan potensi gangguan operasional jika transisi dilakukan terlalu cepat tanpa uji coba yang matang dan sistematis.

Pengalaman dari Global South memberi pelajaran penting: keberhasilan sistem pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi *governance*. Brasil dengan PIX, yang diluncurkan pada tahun 2020, sukses karena melibatkan pentahelix—pemerintah, industri, akademia, media, dan masyarakat sipil—sejak tahap desain.

Proses edukasi dan meyakinkan konsumen ala PIX tidak berfokus pada bujukan persuasif, melainkan pada demonstrasi bukti dan fasilitas total. Bank Sentral Brasil meluncurkan kampanye komunikasi nasional yang masif dengan pesan sederhana—bahwa PIX itu cepat, mudah, gratis, dan aman—sambil mewajibkan semua bank untuk menjadi “agen edukasi” bagi nasabah mereka sendiri.

Keberhasilan utamanya terletak pada produk itu sendiri yang menjadi alat edukasi terbaik; sekali mencoba, pengguna langsung merasakan keunggulan instan dibandingkan sistem lama. Dengan menghilangkan semua hambatan adopsi seperti biaya dan ketersediaan, proses “meyakinkan” konsumen berubah menjadi sekadar “memberi tahu” bahwa solusi yang jauh lebih superior telah hadir, yang

“Kuncinya adalah *adaptive rollout*, komunikasi dua arah yang transparan, pengujian keamanan siber sebelum peluncuran penuh, serta kemitraan lintas sektor. Payment ID bukan sekadar ujian teknologi, tapi ujian kematangan ekosistem kita: apakah kita sekadar mengejar tren, atau membangun sistem pembayaran yang inklusif, aman, dan dipercaya publik.

kemudian memicu adopsi massal melalui pengalaman langsung dan getok tular yang eksplosif.

Lewat kerangka *Creative Permutation Foresight* (CPF) yang sedang saya kembangkan, ada tiga skenario untuk Payment ID:

Skenario terbaik; di mana adopsi cepat, kepercayaan publik meningkat, dan Indonesia menjadi *benchmark* regional—karena mampu mengembangkan pendekatan inklusif, teknologi adaptif, dan perlindungan data berbasis identitas digital yang terverifikasi secara nasional. Keunikan Indonesia terletak pada kombinasi strategi penguatan identitas digital seperti IDChain, kerangka pengawasan AI yang mulai disusun, serta komitmen menyeluruh terhadap inklusi keuangan.

Jika sukses, Payment ID tak hanya mencerminkan kesiapan

teknologi, tetapi juga kematangan sosial dan kelembagaan yang relevan bagi banyak negara berkembang lainnya di Asia Tenggara maupun Afrika.

Skenario moderat; di mana resistensi awal dari masyarakat muncul akibat keraguan terhadap keamanan dan perubahan sistem, namun dapat diatasi secara bertahap melalui kampanye edukatif, demonstrasi langsung atas manfaatnya, serta mekanisme transparansi dan pelibatan aktif komunitas. Pada jalur ini, adopsi mungkin berlangsung lebih lambat, tetapi tetap dapat tumbuh berkelanjutan jika disertai dukungan regulator dan insentif yang tepat bagi penyedia jasa keuangan.

Skenario terburuk; di mana peluncuran terburu-buru tanpa kesiapan teknis dan sosial yang memicu kegagalan sistem, kebingungan publik, serta kebocoran data atau disinformasi yang memperkuat ketidakpercayaan. Dalam situasi ini, tekanan dari masyarakat dapat memaksa pemerintah untuk menarik kebijakan secara mendadak (*rollback*), yang bukan hanya menghambat kemajuan sistem pembayaran digital, tetapi juga merusak momentum transformasi ekonomi digital nasional secara keseluruhan.

Kuncinya adalah *adaptive rollout*, komunikasi dua arah yang transparan, pengujian keamanan siber sebelum peluncuran penuh, serta kemitraan lintas sektor. Payment ID bukan sekadar ujian teknologi, tapi ujian kematangan ekosistem kita: apakah kita sekadar mengejar tren, atau membangun sistem pembayaran yang inklusif, aman, dan dipercaya publik.

Jika berhasil, Payment ID bisa menjadi *milestone* emas yang memacu inovasi ekonomi digital nasional. Jika gagal, ia berpotensi menjadi titik balik yang memperdalam skeptisisme publik terhadap teknologi baru. Pilihannya ada di tangan kita—dan waktu untuk memutuskan arahnya adalah sekarang.

*) *Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN).*

B UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

BOARD OF MANAGEMENT
Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, **Direktur Utama:** Rio Abdurachman Podungge, **Wakil Direktur Utama:** Apreyivita Dyah Wulansari, **Direktur Keuangan & Umum:** Tania Kirana, **Direktur Komersial :** Melly Marliani, **Direktur Legal:** Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (*online*). **Wakil Redaktur Pelaksana:** Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, Leonard Al Cahyoputra, Rangga Prakoso, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (*online*), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (*online*), Mardiana Makmun, Nida Sahara, Thresa Sandra Desfika (*online*), Arnoldus Kristianus, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto (*online*). **Reporter:** Muhammad Ghafur Fadillah, **Sekretariat Redaksi:** Suryani Belsyda. **Produk:** Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. **Desain Grafis:** Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (*General Manager*). **Marcomm & Event Management:** Lucky Sukmawati (*Manager*). **Circulation:** Dwi Ema Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 JI Otista, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 Rek BNI 2828282912 PT. Bersatu Universal Digital Indonesia Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Bank Negara Indonesia Rek : 2828282912 (rek collection) PT Bersatu Universe Digital Indonesia Cabang : Kelapa Gading Swift kode : BNINIDJXXX, Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Kredit Mengganggu Mulai Kendur

JAKARTA, ID – Fasilitas kredit yang belum dicairkan (*undisbursed loan*/UL) debitur di perbankan nasional tercatat sebesar Rp 2.304,26 triliun per Juni 2025, meningkat 7,06% secara tahunan (*year on year*/yoy). Apabila dibandingkan periode tiga bulan sebelumnya, pertumbuhan UL ini mengalami penurunan.

Oleh **Nida Sahara**

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang mengganggu didominasi oleh kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3, mencapai Rp 929,23 triliun per Juni 2025, meningkat 8,9% (yoy). Berikutnya UL di empat bank papan atas sebesar Rp 896,27 triliun, tumbuh tinggi 12,78% (yoy). Sedangkan, UL di KBMI 1 dan 2 tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Di mana kredit yang belum ditarik debitur pada bank KBMI 1 menurun signifikan 14,08% (yoy) menjadi Rp 102,49 triliun per Juni 2025. Kemudian, KBMI 2 juga turun 2,25% (yoy) menjadi Rp 376,26 triliun dari tahun lalu Rp 384,91 triliun.

OJK juga mencatatkan jika dilihat dari kepemilikan bank, pertumbuhan tertinggi kredit mengganggu oleh bank persero dengan kenaikan 20,9% (yoy) menjadi Rp 485,52 triliun per Juni 2025. Fasilitas kredit belum ditarik debitur pada kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) juga naik 8,51% menjadi Rp 300,62 triliun, diikuti bank umum swasta nasional (BUSN) yang naik 3,67% menjadi Rp 1.494,99 triliun. Sebaliknya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat penurunan tajam sebesar 26,64% menjadi Rp 23,13 triliun.

Menurut Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo, mulai melandainya *undisbursed loan* di perbankan dipicu oleh meningkatnya penarikan plafon kredit oleh debitur baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi, seiring realisasi proyek dan belanja korporasi pasca Idulfitri.

Namun, meski UL cenderung

menurun, realisasi pertumbuhan kredit hanya 7,77% (yoy) per Juni 2025 dan melambat sejak awal tahun. Arianto menilai ini karena permintaan kredit baru relatif moderat. “Sebagian debitur telah banyak memanfaatkan fasilitas kredit yang sudah ada ketimbang mengajukan pembiayaan tambahan, sementara perbankan tetap selektif menyalurkan kredit di sektor-sektor berisiko,” ucap Arianto kepada *Investor Daily*, Rabu (13/8/2025).

Dia memproyeksikan UL pada semester II berpotensi melandai secara gradual, seiring dengan pencairan pembiayaan untuk proyek pemerintah, belanja korporasi, dan sektor konsumsi menjelang akhir tahun. Sehingga, penarikan fasilitas kredit di bank biasanya mulai deras di paruh kedua, utamanya kuartal IV.

“Namun, jika penyerapan proyek melambat atau pencairan kredit tertahan akibat kehat-

i-hatian bank menghadapi risiko makro dan sektoral, UL bisa kembali meningkat di kuartal IV,” sambung dia.

Lebih lanjut, dengan asumsi pertumbuhan kredit masih di kisaran 8-9% (yoy) hingga akhir tahun ini, kata Arianto, tren *undisbursed loan* cenderung stabil hingga sedikit menurun, tetapi belum akan menyentuh level pertumbuhan kredit yang agresif.

Kenaikan *undisbursed loan* mencerminkan adanya kebutuhan dari debitur untuk investasi dengan jangka waktu pencairan bertahap, bisa juga menunjukkan debitur menunda penarikan fasilitas kredit yang telah disetujui, lantaran dipengaruhi kondisi ekonomi. Di sisi lain, UL yang menurun juga mencerminkan tidak adanya permintaan kredit baru dari debitur atau debitur sudah menarik fasilitas kreditnya di bank.

Permintaan Kredit Baru

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) dalam survei perbankan mencatatkan pertumbuhan permintaan kredit baru triwulan II-2025 didorong oleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Standar penyaluran kredit perbankan pada triwulan II-2025 dinyatakan lebih ketat dan berhati-hati dibanding triwulan

sebelumnya. Terlihat dari Indeks Lending Standard (ILS) yang positif sebesar 0,08.

Berdasarkan jenis kredit, standar penyaluran kredit yang lebih ketat tersebut didorong oleh jenis kredit UMKM, kredit modal kerja, dan kredit pemilikan rumah

Fasilitas Kredit yang Belum Ditarik (Rp triliun)

Keterangan	Jun'25	Jun'24	YOY (%)
Berdasarkan Modal			
KBMI 1	102.49	119.28	-14.08
KBMI 2	376.26	384.91	-2.25
KBMI 3	929.23	853.28	8.9
KBMI 4	896.27	794.72	12.78
Berdasarkan Pemilik			
Bank Persero	485.52	401.58	20.9
BUSN	1494.99	1442.05	3.67
BPD	23.13	31.53	-26.64
KCBLN	300.62	277.03	8.51
Total	2304.26	2152.19	7.06



SUMBER: OJK, DIOLAH

atau kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA). Kebijakan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati pada kuartal II ini antara lain terdapat pada aspek plafon kredit, premi kredit berisiko, agunan, dan persyaratan administrasi.

Pada triwulan III-2025, penyaluran kredit baru diperkirakan tetap tumbuh. Namun, pertumbuhan nilai Saldo Bersih Tertimbang atau SBT diperkirakan melambat dibanding kuartal II. Penyaluran kredit baru kuartal III diperkirakan tumbuh dengan nilai SBT sebesar 81,71%.

Chief Economist PT Bank

Permata Tbk Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan kredit industri perbankan tahun ini sebesar 8,88% (yoy) dengan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sekitar 9-11% (yoy). Proyeksi

Permata Bank untuk pertumbuhan kredit di kuartal II-2025 tepat yakni sebesar 7,77%. Pihaknya mengatakan, dilihat secara segmentasinya, sudah mulai terlihat penurunan secara keseluruhan untuk kredit.

“Namun segmen bisnis UMKM masih menunjukkan tren ataupun pertumbuhannya yang paling lemah dibandingkan segmen bisnis lainnya. Sementara itu, korporasi masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang relatif lebih tinggi dibanding segmen bisnis lainnya,” jelas Josua.

Untuk kuartal III-2025, pihaknya memprediksi kredit bisa tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 8,24% (yoy) dan di kuartal IV tumbuh 8,88% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun ini kredit bisa naik 8,88% (yoy).

“Portfolio kredit perbankan secara umum industri, masih terkonsentrasi di manufaktur, perdagangan. Dari sisi sektor produktifnya di dua sektor tersebut, lalu kalau konsumsinya masih berkaitan dengan kredit di KPR, sekalipun trennya sudah menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun ini,” urai Josua.

BSI Incar Tabungan Haji Rp 1 Triliun per Bulan

JAKARTA, ID – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendorong optimalisasi dana murah lewat tabungan haji. Hal itu diperkuat dengan *positioning* BSI sebagai bank syariah, tingginya potensi jamaah haji di Indonesia dengan masa tunggu yang relatif panjang.

Setiap tahun Indonesia mengirim jamaah haji sekitar 221 ribu atau sekitar 1/1000 dari total populasi penduduk satu negara sesuai kebijakan pemerintah Arab Saudi. Sementara, rerata jamaah haji Indonesia yang berangkat haji menggunakan Tabungan Haji BSI sebanyak 172 ribu jamaah atau sekitar 84,7%.

Direktur *Sales & Distribution* BSI Anton Sukarna mengatakan tren pendaftaran haji juga meningkat. Tahun

2023-2024 jumlah pendaftaran haji di BSI naik 23%. Sejalan dengan meningkatnya animo berhaji, masyarakat juga mulai sadar digital di mana hendak mendaftar haji lewat aplikasi *mobile banking* di mana per posisi tahun 2024 sebanyak 42%. Pihaknya menargetkan menghimpun tabungan haji sebesar Rp1 triliun per bulan.

“Kami sebenarnya punya program, satu bulan ya pertumbuhan dana haji kami itu kurang lebih Rp 1 triliun. Jadi, *one month*, Rp 1 *trillion*,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Untuk mencapai target tersebut, ia menuturkan perseroan mengupayakan minimal 250 ribu pembukaan rekening baru setiap bulan. (**nid**)

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA	
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dan Reksa Dana sebagai berikut: 1. Reksa Dana Syariah Batavia Global ESG Sharia Equity USD ; 2. Reksa Dana Syariah Batavia China Sharia Equity USD ; 3. Reksa Dana Syariah Batavia Technology Sharia Equity USD ; 4. Reksa Dana Syariah Bertasik Efek Syariah Luar Negeri Batavia India Sharia Equity USD; Dengan ini bermaksud untuk mengumumkan rencana perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus Reksa Dana di atas yang antara lain (i) menyesuaikan definisi “Daftar Efek Syariah” dan “Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah” sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 10 April 2025 tentang Pemberian Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan (ii) menyesuaikan acuan investasi Reksa Dana pada Efek Syariah Luar Negeri.	
Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu https://www.bpam.co.id/	
Berdasarkan perubahan di atas, maka kami juga akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum pada KIK dan Prospektus terkait perubahan di atas (jika ada).	
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan serta pihak-pihak yang berkepentingan.	
Jakarta, 14 Agustus 2025 PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	

ZURICH®															
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN															
LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam jutaan Rupiah)					LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (dalam jutaan Rupiah)					INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
ASET			30 Jun 2025	31 Des 2024	LIABILITAS DAN EKUITAS			30 Jun 2025	31 Des 2024	URAIAN			30 Jun 2025	31 Des 2024	
I. INVESTASI					I. UTANG					I. PENDAPATAN UNDERWRITING					
1	Deposito Berjangka	392.200	419.840	1	Utang Klaim	53.328	37.968	1	Premi Bruto			A. Tingkat Solvabilitas			
2	Sertifikat Deposito	-	-	2	Utang Koasuransi	-	-	2	a. Premi Penutupan Langsung	1.722.075	1.445.045	a. Aset yang Diperkenankan			
3	Saham	37.107	41.417	3	Utang Reasuransi	133.425	111.243	3	b. Premi Penutupan Tidak Langsung	7.803	2.684	b. Liabilitas (Kecuali Pinjaman Subordinasi)			
4	Obligasi Korporasi	1.217.206	1.184.516	4	Utang Komisi	292.272	304.811	3	Jumlah Pendapatan Premi	1.729.878	1.447.729	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas			
5	MTN	-	-	5	Utang Pajak	13.903	6.444	4	c. Komisi Dibayar	403.124	349.997	B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	4.266.292	3.892.947	6	Biaya yang Masih Harus Dibayar	399.524	251.636	5	Jumlah Premi Bruto	1.326.754	1.097.732	a. Risiko Kredit			
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	7	Utang Lain	1.628.624	1.673.098	6	Premi Reasuransi			b. Risiko Likuiditas			
8	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	8	Jumlah Utang (1 s.d. 7)	2.521.076	2.385.200	7	a. Premi Reasuransi Dibayar	338.814	316.629	c. Risiko Pasar			
9	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	II. CADANGAN TEKNIS					8	b. Komisi Reasuransi Diterima	82.080	75.419	d. Risiko Asuransi		
10	Reksa Dana	-	-	9	Cadangan Premi	-	-	9	Jumlah Premi Reasuransi	256.734	241.210	e. Risiko Operasional			
11	Elek Beragun Aset	-	-	10	Cadangan atas Premi yang Belum			10	Jumlah Premi Neto	1.070.020	856.521	f. Jumlah MMBR			
12	Dana Investasi Real Estat	-	-	11	Memupakan Pendapatan	1.412.137	1.439.117	11	Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,			C. Kelebihan (Kekurangan) Batas			
13	REPO	-	-	12	Cadangan atas Risiko Bencana			12	CAPYBMP, dan Cadangan Catastrophic			Tingkat Solvabilitas			
14	Penyerahan Langsung	385	385	13	Cadangan atas Risiko Bencana			13	a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi			D. Rasio Pencapaian (%) *			
15	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	-	-	14	Cadangan atas Risiko Bencana			14	b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(18.103)	30.403				
16	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	15	Cadangan atas Risiko Bencana			15	c. Penurunan (Kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana Catastrophic						
17	Emas Murni	-	-	16	Cadangan atas Risiko Bencana			16	Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(18.103)	30.403				
18	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	17	Cadangan atas Risiko Bencana			17	Jumlah Pendapatan Premi Neto	1.051.917	886.924				
19	Pinjaman Polis	-	-	18	Cadangan atas Risiko Bencana			18	Pendapatan Underwriting Lain Neto	63.158	48.445				
20	Investasi Lain	-	-	19	Cadangan atas Risiko Bencana			19	Jumlah Pendapatan Underwriting	1.115.075	935.369				
21	Jumlah Investasi (1 s.d. 20)	5.913.190	5.539.105	20	Cadangan atas Risiko Bencana			II. BEBAN UNDERWRITING							
II. BUKAN INVESTASI					III. EKUITAS					Beban Klaim					
22	Kas dan Bank	140.054	133.599	21	Modal Disetor	3.149.469	3.149.469	1	a. Klaim Bruto	566.399	543.263				
23	Tagihan Premi Penutupan Langsung	605.648	745.801	22	Agio Saham	53.339	53.339	2	b. Klaim Reasuransi	53.010	87.919				
24	Tagihan Premi Reasuransi	5.771	2.593	23	Saldo Laba	1.187.395	1.271.137	3	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	148.741	53.280				
25	Aset Reasuransi	460.260	542.752	24	Komponen Ekuitas Lainnya	54.461	(43.332)	4	Jumlah Beban Klaim Neto	662.130	508.624				
26	Tagihan Klaim Koasuransi	71.121	72.353	25	Jumlah Ekuitas (17 s.d. 20)	4.444.664	4.430.613	5	Beban Underwriting Lain Neto	-	-				
27	Tagihan Klaim Reasuransi	87.849	81.112	26	Jumlah Liabilitas dan			6	Jumlah Beban Underwriting	662.130	508.624				
28	Tagihan Investasi	-	-	27	Ekuitas (14+15+16+21)	9.594.131	9.328.004	7	HASIL UNDERWRITING	452.945	426.745				
29	Tagihan Hasil Investasi	-	-	28				8	Hasil Investasi	178.099	167.761				
30	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	99.514	101.541	29				9	Beban Usaha						
31	Biaya Akuisisi yang Dilangguhkan	586.424	605.466	30				10	a. Beban Pemasaran	82.595	112.708				
32	Aktiva Tetap Lain	27.745	33.105	31				11	b. Beban Umum dan Administrasi	221.482	188.820				
33	Aset Lain	1.596.555	1.470.577	32				12	- Beban Pegawai dan Pengurus	1.733	1.722				
34	Jumlah Bukan Investasi (22 s.d. 33)	3.680.941	3.788.899	33				13	- Beban Pendidikan dan Pelatihan	296.909	219.630				
35	Jumlah Aset (21 + 34)	9.594.131	9.328.004	34				14	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-				
										</					

Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja RI

JAKARTA, ID -Peluang pekerja dengan keahlian khusus (*Specified Skilled Worker/SSW*) di Jepang bukan hanya soal penempatan tenaga kerja, namun tentang membangun posisi Indonesia sebagai pemasok talenta unggul di tingkat global. Jepang menargetkan untuk merekrut 820.000 talenta asing dengan visa Pekerja Migran Bersyarat (PSB) pada 2029. Berdasarkan data, Indonesia telah memasok sekitar 10.181 PSB, banyak di antaranya bekerja di sektor konstruksi, perhotelan, pertanian, dan lain-lain.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, sebanyak 10.000 pekerja dikirim ke Jepang dengan skema SSW. "Saat ini, Jepang sedang menghadapi super aging. Ibaratnya seperti tutup dan botol, di Indonesia bonus demografi, di Jepang aging," kata dia pada acara bertajuk "Strengthening Workforce Diplomacy: Indonesia Strategic SSW Expansion to Japan" yang digelar Indonesia Business Council (IBC) di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Karding menegaskan bahwa peluang SSW Jepang harus menjadi pemicu reformasi menyeluruh dalam penyiapan tenaga kerja migran. Dia memaparkan, bahwa peluang penyerapan tenaga kerja melalui skema SSW Jepang adalah momentum strategis untuk mempercepat peningkatan keterampilan, memperluas sertifikasi, dan memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen menghapus hambatan di bidang pelatihan, penguasaan bahasa, dan administrasi penempatan agar tenaga kerja kita mampu bersaing di pasar global serta membawa pulang manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian nasional," kata Karding.

Pemerintah Indonesia melihat bahwa program magang yang diterapkan pemerintah Jepang terlalu lama. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia ingin Jepang memper-singkat masa magang menjadi tidak lebih dari satu tahun.

Selama ini Jepang mengizinkan warga negara asing muda untuk menjalani pelatihan praktis yang dapat berlangsung hingga lima tahun. Para peserta pelatihan dapat dipromosikan menjadi apa yang mereka sebut "pekerja terampil khusus" atau SSW jika mereka berhasil menyelesaikan pelatihan dengan memuaskan, sehingga mendapatkan gaji yang lebih besar.

Karding mengatakan, pemerintah menolak warganya bekerja sebagai tenaga kerja murah atau "*cheap labor*" di luar negeri. Dia mengaku pemerintah risau program magang dapat menjadi kedok untuk mendapatkan tenaga kerja murah. "Kami tidak masalah dengan magang, tapi tolong kalau tiga tahun itu tenaga kerja murah," ucap dia.

Karding menambahkan, program magang memang dibutuhkan Indonesia, tetapi idealnya program magang tidak lebih dari satu tahun. "Pada akhirnya, ini hanyalah program pelatihan," ucap dia.

Jepang mendesak perusahaan untuk memperlakukan talenta asing ini sama seperti karyawan lokal mereka. Namun, perusahaan dapat mengurangi gaji SSW jika mereka kurang menguasai bahasa. "Memang bahasa menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi orang Indonesia saat bekerja di luar negeri," jelas Karding,

Dewan Pembica IBC Arsjad Rasjid menerangkan, penghasilan pekerja magang tentu saja berbeda dengan pekerja purnawaktu atau kontrak. "Dengan sendirinya berbeda pendapatan yang dapat dari seseorang yang istilahnya magang dan seseorang yang bekerja, perlindungannya juga berbeda, misalnya asuransi kesehatan dan lain-lain, dan ada kontrak kerja kalau misalnya ada migran," terang dia.

Chief Executive Officer Indonesian Business Council (IBC), Sofyan Djali melnegaskan bahwa peluang SSW Jepang bukan hanya soal penempatan tenaga kerja, tetapi tentang membangun posisi Indonesia sebagai pemasok talenta unggul di tingkat global. **(ind)**



Antara

Pameran Indo Water Expo Forum 2025 di Jakarta
Pengunjung mengamati mesin untuk pengolahan air bersih pada Indo Water Expo & Forum 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pameran tersebut menjadi sebuah ekosistem yang mempertemukan para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, asosiasi, serta pelaku usaha mesin pengolahan air untuk menampilkan inovasi teknologi baru dan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

Industri Keramik Terimpit Kenaikan Biaya Produksi

JAKARTA, ID - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan, meski utilitas mulai membaik pada semester I-2025, industri keramik terhimpit dengan kenaikan biaya produksi.

Oleh **Leonard AL Cahyoputra**

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kenaikan tersebut karena adanya pembatasan volume gas dengan harga gas bumi tertentu (HGBT). Berdasarkan informasi terbaru dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), industri keramik yang berada di Jawa bagian Barat mulai 13 Agustus sampai 31 Agustus hanya diperbolehkan memanfaatkan volume gas HGBT sebanyak 48% dari yang sebelumnya 60%. Sedangkan di wilayah timur dibatasi 40%. Bila melebihi akan dikenakan Surcharge US\$ 14,8/mmbtu dengan alasan *force majeure*.

Dia mengatakan, selain kenaikan biaya produksi, industri keramik juga terhimpit oleh penurunan daya beli masyarakat dan gempuran produk impor dari India dan China. Gangguan produk impor keramik dari India meningkat 130% persen di lima bulan pertama 2025 dan terindikasi melakukan praktik dumping. "Pasar Indonesia sebagai salah satu negara pengalihan pasar ekspor keramik India ke Amerika Serikat (AS) yang terdampak perang tarif," kata Edy kepada *Investor Daily*, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk keramik (HS 69) tercatat mencapai US\$24,82 juta pada Januari-Juni 2025 atau naik 90% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya US\$13 juta.

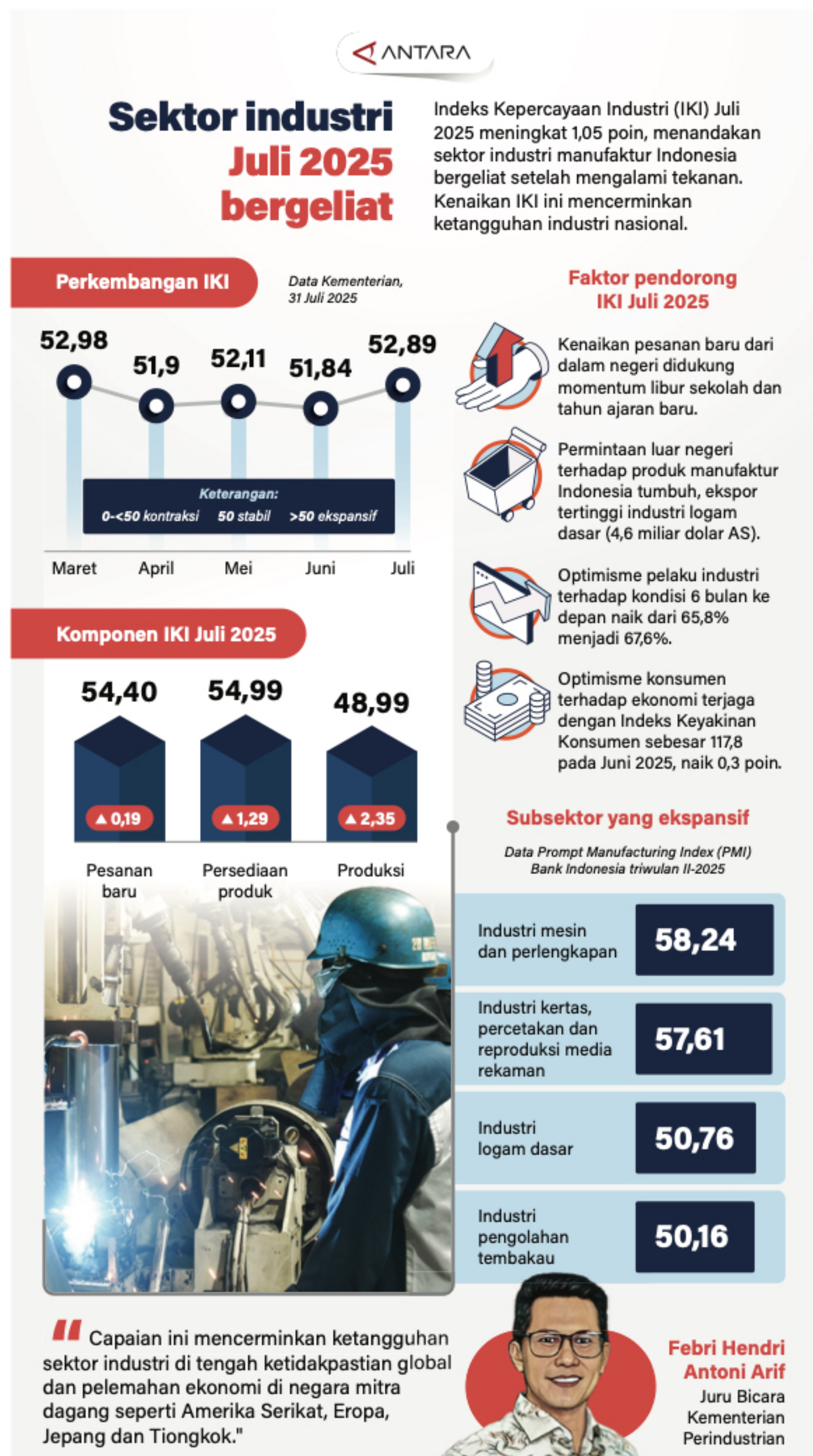
Asaki berharap kehadiran pemerintah untuk mencari solusi berkaitan gangguan pasokan gas dari PGN berupa kuota pemakaian gas HGBT. Apalagi, saat ini industri tengah diadang banjir impor keramik dengan harga murah yang makin menjepit produksi. "Ini bisa diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga dan jangka panjang akan berdampak pengurangan tenaga kerja karena kebanyakan industri memilih untuk memproduksi sebatas kuota gas atau AGIT [alokasi gas industri tertentu] dari PGN," ujar dia.

Asaki sangat mendukung rencana pemerintah untuk membuka keran impor LNG dan penerapan DMO gas. "Ini karena industri tidak bisa bertumbuh tanpa kelancaran gas dan industri tidak bisa berdaya saing dengan harga gas regasifikasi LNG US\$ 14,8/mmbtu," ucap dia.

Tunjukkan Pemulihan

Edy menjelaskan, industri keramik nasional saat ini mulai menunjukkan pemulihan yang ditunjukkan dengan stabilnya kapasitas produksinya. Dalam catatan Asaki, tingkat utilisasi produksi pada semester I-2025 berada di kisaran 70%-71% atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 60%.

Adapun, secara volume produksi meningkat sekitar 62 juta meter persegi



atau bertumbuh 16,5% (year-on-year/yoy). "Kinerja industri keramik nasional di semester I/2025 meskipun bertumbuh, namun masih di bawah target Asaki yakni tingkat utilisasi 75% untuk semester I/2025 ini," jelas dia.

Padahal, pada kuartal I-2025, utilisasi sektor keramik domestik menunjukkan perbaikan, yakni di angka 75% dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. Edy menerangkan, peningkatan ini diperoleh setelah mendapatkan dukungan pemerintah, yaitu berupa kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTMP), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), serta kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk sektor keramik. "Melalui kebijakan tersebut, kita memprediksi utilisasi sektor keramik bisa naik hingga 85 persen, namun terkendala oleh distribusi gas," ucap dia.

Tiga Juta Rumah

Edy menerangkan, memasuki semester kedua, Asaki berharap peme-

rintah segera memulai program tiga juta unit rumah. Ini akan menciptakan permintaan baru dalam negeri yakni mendorong konsumsi ubin keramik, genteng keramik dan produk sanitary. "Estimasi Asaki program 3 juta unit rumah mampu mendorong peningkatan tingkat utilisasi produksi keramik nasional dari 70% ke 80% di semester dua," kata dia.

Dalam keterangan tertulisnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa de-

pan dengan penuh martabat," kata dia.

Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.

Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi "backlog" perumahan. Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.

Peroleh Suplai Gas
Pada kesempatan terpisah, *Corporate Secretary* PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Fajriyah Usman menyampaikan, perusahaan plat merah tersebut aktif menjalin komunikasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memperoleh suplai gas.

"Jadi, sekarang secara reguler kami rapat dengan mereka (KKKS), baik langsung dengan pemasoknya, maupun lewat pemerintah," ucap dia seperti dikutip dari *Antara*.

Fajriyah menyampaikan, PGN berperan sebagai pembeli gas sekaligus pemilik infrastruktur penyalur gas. Oleh karena itu, PGN acap kali dilibatkan oleh pemerintah dalam pembahasan dengan KKKS.

Adapun yang dibahas bersama pemerintah, yakni destinasi penyaluran gas, apa saja infrastruktur yang harus dibangun, hingga penyaluran gas ke berbagai industri. "Secara reguler selalu ada pembahasannya, yang Andaman, yang Masela. Harapannya, PGN bisa menjadi bagian dari perusahaan gas yang bisa mendapatkan hasil dari sumur-sumur baru itu," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Fajriyah mengakui sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PGN, yakni ketersediaan pasokan gas, keandalan infrastruktur, dan harga gas. Komunikasi intens bersama KKKS merupakan salah satu upaya PGN untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pasokan gas.

Dia menjelaskan bahwa kelangkaan pasokan gas diakibatkan oleh *natural decline* atau penurunan produksi yang terjadi secara alami di sumur-sumur gas, terganggunya operasional gas di sektor hulu migas, hingga meningkatnya permintaan terhadap gas.

Persoalan harga gas juga terkait dengan permasalahan kelangkaan ketersediaan gas. Fajriyah mengatakan, keterbatasan gas pipa yang menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan pelanggan, PGN sejak Mei 2024 memperkenalkan LNG kepada pelanggan-pelanggannya.

Dampak dari penggunaan LNG sebagai pengganti gas pipa adalah harga gas yang meningkat. "Memang harga dari LNG itu juga lebih tinggi daripada harga gas pipa, akhirnya memang menjadi salah satu hal yang mempengaruhi harga gas secara umum di industri," tutur dia. **(ant)**

Kementerian PU Dukung Ketahanan Pangan di Jawa Timur

JAKARTA, ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memastikan Bendungan Semantok yang berlokasi di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dapat memberikan manfaat optimal untuk mendukung pertanian, guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Bendungan ini telah diresmikan pada akhir tahun 2022 lalu dengan fungsi utama untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.900 Hektare (Ha).

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan pengelolaan Bendungan Semantok berjalan optimal, baik dari sisi teknis maupun pemanfaatannya sebagai pasokan air irigasi agar lebih stabil sepanjang tahun, khususnya di musim kemarau.

“Bendungan Semantok dibangun untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah ini. Dulu, saya pernah datang ketika bendungan ini belum terisi air, dan sekarang, berkat musim hujan, waduk sudah penuh dan siap dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” kata Menteri Dody saat meninjau Bendungan Semantok, dikutip dari keterangan rilisnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Pada musim kemarau, Bendungan Semantok dapat dimanfaatkan sebagai pendistribusi air irigasi guna mencegah terjadinya kekeringan pada areal persawahan di wilayah hilir. Bendungan ini dilengkapi jaringan irigasi sebesar 2,47 m3 per detik untuk menyuplai lahan pertanian seluas 1.900 Ha. Dengan begitu, kehadiran bendungan diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut yang sebelumnya menggunakan sistem perairan tadah hujan.

Bendungan ini didesain memiliki kapasitas tampung sebesar 32,67 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Semantok. Dengan panjang puncak bendungan sekitar 3 kilometer (km), Bendungan Semantok dikenal memiliki tubuh bendungan terpanjang di Indonesia.

Selain memberi manfaat sebagai penyuplai irigasi pertanian, bendungan dengan luas area genangan sebesar 365 Ha ini juga diproyeksi sebagai penyedia air baku sebesar 312 liter per detik untuk melayani tiga kecamatan di Nganjuk, yakni Rejoso, Lengkong, dan Gondang. Kehadiran Bendungan Semantok juga berfungsi mereduksi risiko banjir 137 m3 per detik pada wilayah hilir yang dialiri Sungai Semantok saat musim hujan.

Menteri Dody berharap kehadiran Bendungan Semantok memberikan manfaat ganda tidak hanya sebagai penopang sektor pertanian, pengendali banjir dan penyuplai air baku, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata di Jawa Timur yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal.

“Bendungan ini dibuka untuk umum, terutama saat musim libur nasional, sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Bendungan Sutami

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga sempat melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Sutami yang berlokasi di Desa Karangates, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Menteri Dody memastikan fungsi Bendungan Sutami dalam kondisi baik untuk menunjang Asta Cita Presiden Prabowo khususnya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi dan air.

Menteri Dody menyampaikan bahwa Bendungan Sutami merupakan salah satu bendungan strategis di Jawa Timur yang usianya lebih dari 50 tahun sehingga memerlukan perawatan khusus untuk dapat melayani secara maksimal.

“Bendungan ini sudah beroperasi sangat lama. Maka dari itu, diperlukan perawatan khusus agar bendungan dapat berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal,” jelas Menteri Dody.

Bendungan yang namanya diambil dari Menteri Pekerjaan Umum Indonesia ke-16 ini memiliki luas genangan waduk sebesar 15 km2, dengan luasan sebesar itu Bendungan Sutami dapat menampung 175,11 juta m3 air.

Bendungan ini memiliki fungsi utama sebagai penyuplai air irigasi seluas 34.000 Ha, Pembangkit Listrik Tenaga Air sebesar 488 Juta kWh per tahun dan juga sebagai pengendali banjir Q1.000 sebesar 4.200 m3 per detik.

Untuk sistem pengelolaan dan pemantauan air dilakukan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I yang sudah terkoneksi dengan Command Centre yang ada di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) di Jakarta.

PJT I merupakan BUMN yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya air. Saat ini PJT I mengelola air di lima Wilayah Sungai (WS) di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, yakni Brantas, Bengawan Solo, Jratunseluna, Serayu Bogowonto, dan Toba Asahan.

Menteri Dody sempat berdialog dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Malang. Para Petani menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan dalam memanfaatkan jaringan irigasi.

Untuk menjaga agar bendungan terus berfungsi dengan baik dengan dilakukan beberapa pekerjaan yang senantiasa dilakukan, mulai dari perawatan pintu air, perbaikan instalasi bendungan, pelumasan mesin, monitoring instrumentasi keamanan bendungan seperti pengamatan rembesan, pengamatan pergeseran bendungan baik secara vertikal ataupun horizontal dan pembersihan sampah serta pengerukan sedimentasi. **(hf)**



Rakor Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harymurti Yudhoyono (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kedua kiri), Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara (kedua kanan), dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah (kanan) mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (13/8/2025). Rapat tersebut membahas evaluasi, progres dan capaian isu strategis bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tahun 2025.

Keselamatan Jadi PR Manajemen Baru PT KAI

JAKARTA, ID – Bobby Rasyidin resmi ditunjuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) pun menunggu untuk dituntaskan dirut baru PT KAI beserta jajaran direksinya.

Oleh Heru Febrianto

Sebelumnya Bobby Rasyidin merupakan Direktur Utama PT Len Industri, hingga akhirnya diangkat menjadi orang nomor satu di BUMN perkeretaapian sekaligus menggantikan posisi Didiék Hartantyo.

Selain Didiék, pemegang saham juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT KAI. Kementerian BUMN dan PT Danantara Asset Management memberhentikan dengan hormat empat jabatan komisaris dan enam orang direksi termasuk Didiék Hartantyo.

Hal tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan SK.038/DI-DAM/DO/2025 dan Nomor: SK-224/MBU/08/2025 dan SK.039/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

Sejumlah wajah baru yang duduk di bangku komisaris diantaranya Purnomo Suctopo sebagai Komisaris, I Wayan Sugiri sebagai Komisaris, Arnanto sebagai Komisaris Independen dan Raizal Arifin sebagai Komisaris Independen.

Sedangkan posisi direksi baru diisi oleh Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi, Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko.

Selain itu, ada juga Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha dan Indarto Pamoengkas menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji yang mewakili manajemen PT KAI

menyampaikan terima kasih kepada Johan Bakti Porsea Sirait, Chairul Anwar, Sri Paduka Mangkoenagoro X, Rochadi, Didiék Hartantyo, Hadis Surya Palapa, Rudi As Aturridha, Rosma Handayani, dan John Robertho atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusi yang telah diberikan dalam memajukan KAI.

“Kami menyambut baik kehadiran jajaran komisaris dan direksi yang baru akan memperkuat langkah KAI dalam menghadirkan layanan terbaik dan berkontribusi bagi kemajuan perkeretaapian nasional,” ujar Agus dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, perubahan susunan dewan komisaris dan direksi ini menjadi momentum penting bagi PT KAI untuk melanjutkan strategi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan.

“KAI akan terus melakukan pembaruan dan perbaikan secara menyeluruh demi mewujudkan visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan nilai tambah yang kontinu bagi masyarakat dan bangsa,” tutup Anne.

Anggaran IMO

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyatakan isu keselamatan dan pelayanan harus menjadi perhatian utama dirut baru PT KAI beserta jajaran direksinya.

Seperti diketahui, pada awal Agustus 2025 terjadi



Bobby Rasyidin

tiga peristiwa anjloknya rangkaian kereta api (KA) hingga berdampak pada terhambatnya perjalanan. Peristiwa pertama terjadi pada KA 1 Argo Bromo Angrek yang mengalami anjlok di emplasemen Stasiun Pegadenbaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (1/8) sekitar pukul 15.47 WIB.

PT KAI memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun jalur hulu dan hilir terganggu selama delapan hingga 10 jam, dan rute perjalanan kereta lain pun ikut terganggu.

Selanjutnya, rangkaian kereta rel listrik (KRL) Comuter Line anjlok di emplasemen Stasiun Jakarta Kota pada Selasa (5/8) sekitar pukul 07.17 WIB. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman. Akibatnya, perjalanan KRL menuju Jakarta terganggu. Sejumlah KRL sempat terhahan di Stasiun Transit Manggarai, Jakarta Selatan.

Pada hari yang sama, Kereta Api Kuala Stabas dengan rute Tanjungkarang-Baturaja mengalami anjlok di jalur hilir kilometer 141+2, tepatnya di petak jalan antara Negeriagung dan Tulungbuyut, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Se-

lasa (5/8) sore.

Menurut Djoko, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus segera menandatangani kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO). Pasalnya, IMO yang diberikan pemerintah hanya menutup 10% dari kebutuhan yang ada.

“Panjang jalan rel terus bertambah, semestinya anggaran IMO sebagai kewajiban negara untuk menjaga keselamatan harus bertambah, bukan menurun. Apalagi ikut dipangkas demi efisiensi,” kata Djoko.

Selain itu, kata Djoko, pengelolaan prasarana dan sarana perkeretaapian harus terpisah seperti sebelumnya. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, penyelenggaraan prasarana dan/atau sarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.

“Karena cukup berat bagi direktornya, urusan prasarana saja sudah kewalahan malah ditambah urusan sarana yang juga tidak sedikit masalahnya. Jika dibiarkan, bisa berujung pada keselamatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Aditya Dwi Laksana mengatakan pergantian direksi di lingkungan PT KAI diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para penggunanya. Menurut dia, banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah.

“Misalnya menekan angka kecelakaan apakah itu karena faktor teknis mau-

pun faktor manusia. Itu berarti dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya produksi dan sumber daya manusia,” ujar dia kepada *Investor Daily*.

Di sisi lain, PT KAI juga harus memperhatikan perlintasan sebidang yang dilalui rangkaian kereta. Hal tersebut dinilai penting, mengingat banyaknya terjadi kecelakaan antara kendaraan dan kereta saat melintasi perlintasan sebidang.

“Ini tentu harus menjadi perhatian, bagaimana agar persoalan perlintasan sebidang tidak harus lempar tanggung jawab, walaupun harus lempar tanggung jawab bagaimana menyakinkan *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini tugas berat tentu saja fokusnya selain pelayanan, bagaimana menekan kecelakaan transportasi di sektor ini,” pungkasnya.

Investigasi Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamatan transportasi nasional harus menjadi prioritas bersama. Hal ini disampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna ke-8 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/8) lalu.

Menko AHY menyampaikan bahwa investigasi menyeluruh harus dilakukan terhadap insiden kecelakaan yang terjadi pada moda transportasi kereta api, laut, maupun transportasi umum lainnya.

“Saya akan investigasi secara utuh ya, agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan transportasi kereta (Argo Bromo), termasuk juga moda transportasi di laut. Saya sudah menyampaikan bahwa harus diinvestigasi secara penuh, apakah itu masalah teknis, masalah keretanya, termasuk prasarana pendukungnya, relnya, termasuk juga untuk kapal. Apakah karena kondisinya memang tidak layak, atau juga ada faktor *fatigue*, *human error*, dan lain sebagainya,” ujar Menko AHY.

Jumlah Penumpang Kereta Api Semester I-2025 (ribu orang)

Kereta Api	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Jabodetabek	27522	27204	26974	27552	28561	28205
Jabodetabek (Jawa)	7763	7067	6762	9350	8197	9006
Non Jabodetabek*Non Jabodetabek	35286	34271	33736	36902	36758	37211
Non Jawa (Sumatera + Sulawesi)	602	541	502	719	635	655
Kereta Bandara	765	709	662	838	764	773
MRT	3535	3477	3197	3259	3632	3609
LRT	2639	2559	2436	2631	2767	2811
Kereta cepat (Whoosh)	525	477	346	499	529	555
Total	43357	42034	40879	44848	45084	45614

SUMBER: BPS

Dampak AI bagi Ketahanan Informasi dan Ekonomi Digital

JAKARTA, ID – Kehadiran teknologi *artificial intelligence* (AI) turut berdampak pada dua isu krusial, yaitu ketahanan informasi dan ekonomi digital. Dari sudut ketahanan informasi, fenomena misinformasi dan disinformasi yang diproduksi dengan *GenAI*, seperti *deepfake* dan manipulasi foto atau video turut berpengaruh terhadap integritas.

Oleh Emanuel Kure

Sedangkan, dari sisi ekonomi digital, tantangan muncul dalam bentuk penipuan daring yang dimotori oleh AI. Maraknya penipuan daring pun berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap internet.

Hal itu terungkap dalam diskusi *Center for Digital Society* (CfDS), lembaga pusat penelitian di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berkolaborasi dengan Safer Internet Lab (SAIL). Kedua lembaga tersebut menggelar diskusi yang bertajuk "AI dan Ekonomi Digital: Ketahanan Informasi & Masa Depan Dunia Kerja".

Peneliti SAIL Rifqi Rahman mengulas beberapa temuan penelitian SAIL mengenai dampak Generative AI (*GenAI*) terhadap ekosistem informasi di tiga bidang, yakni bidang ekonomi digital, geopolitik dan demokrasi khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam bidang ekonomi digital, tantangan muncul dalam bentuk penipuan daring yang dimotori oleh AI. Maraknya penipuan daring pun berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap internet.

Dalam bidang geopolitik, Rifqi menyoroti adanya pergeseran perilaku manipulasi dan intervensi informasi asing (FIMI) dari yang ber-

basis isu lokal menjadi global serta dari *state-actors* ke *non-state actors*.

Sedangkan, di bidang demokrasi, hasil survei yang dilakukan SAIL menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi yang diproduksi dengan *GenAI*, seperti *deepfake* dan manipulasi foto/video, dianggap sebagai konten yang paling berpengaruh terhadap integritas pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Rifqi menekankan bahwa ekosistem informasi saat ini semakin dapat dilakukan oleh siapapun. "Hari ini, siapapun bisa mengakses informasi dan memproduksi konten," kata Rifqi dalam keterangan persnya, dikutip Rabu (13/8/2025).

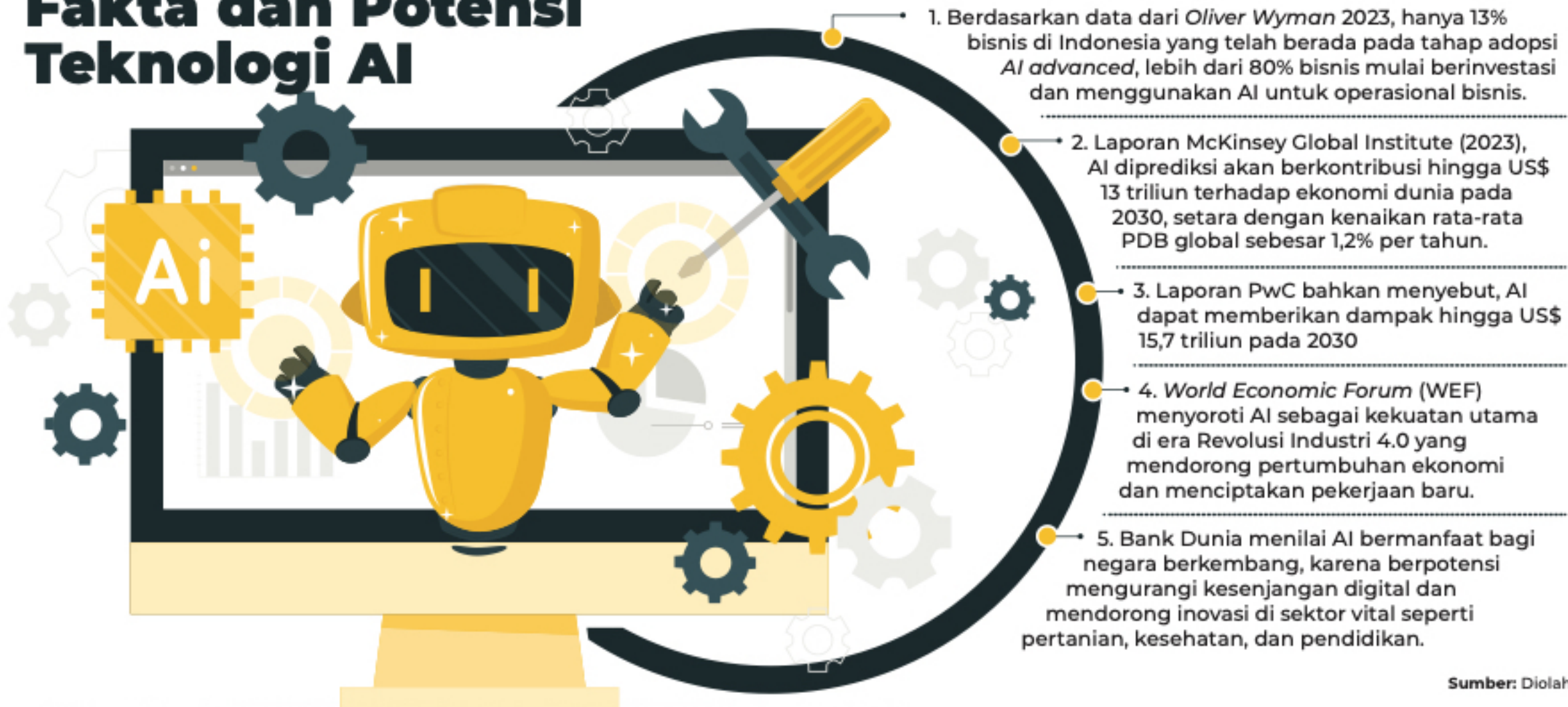
Menurut Rifqi, persoalannya bukan lagi soal penggunaan teknologinya, tetapi soal pemanfaatan. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kolaborasi nyata antara pembuat kebijakan, perusahaan platform, dan masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat.

"*Pragmatic* ini dapat menjadi satu model yang kami bayangkan secara *hypothetically* bisa dijabaki lebih jauh yang mana ada satu titik tempat di mana ketiga entitas utama itu bersama-sama mencoba mencapai satu *common objective* tapi bagaimana itu diimplementasikan pada akhirnya akan tergantung entitas masing-masing," jelas Rifqi.

Isu Ekonomi Digital

Sementara, Dosen Hubungan Internasional UGM dan pendiri STAIR

Fakta dan Potensi Teknologi AI



Community Indonesia Suci Lestari Yuana menyoroti mengenai konsekuensi AI bagi ketenagakerjaan, terutama pada isu pekerjaan layak (*decent work*) dalam ekonomi platform.

Berangkat dari penelitiannya bersama International Labor Organization (ILO), Suci menyoroti bagaimana algoritma AI, melalui gamifikasi dan insentif semu, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja platform di Asia Tenggara (Asean).

Dalam konteks platform transportasi online, Ia mencontohkan minimnya transparansi dalam relasi kerja antara platform digital dan para pekerja.

"Mitra pengemudi tidak tahu bagaimana algoritma menentukan tarif, penalti, bahkan keputusan untuk menonaktifkan akun mereka," ungkap Suci.

Realitanya, lanjut Suci, mitra pengemudi seolah dipaksa oleh algoritma AI untuk terus bekerja. Hal ini, menurut Suci, menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif dan jauh dari prinsip kerja layak.

"Ada yang namanya *rights to disconnect*, yakni ketika pekerja punya

hak untuk mematikan aplikasinya atau ingin beristirahat. Kalau ada perusahaan platform yang justru menghukum atau memberikan disinsentif terhadap pekerja yang sedang beristirahat, maka itu salah satu bentuk dari kerja paksa," terang Suci.

Merespons temuan penelitian tersebut, Suci juga menambahkan bahwa regulasi yang adaptif dan adil diperlukan untuk menjembatani inovasi dan kesejahteraan pekerja. Keduanya pun sepakat bahwa setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan teknologi AI dalam perkembangan ekonomi digital dan ekosistem informasi.

"Pertama, dibutuhkan penyusunan regulasi yang rigid dengan pendekatan lintas sektor yang kolaboratif dan inklusif. Kedua, pentingnya peningkatan edukasi dan literasi digital, terutama mengenai teknologi AI, bagi masyarakat luas," tegas Suci.

Peta Jalan AI

Di sisi lain, dalam rangka akselerasi pengembangan dan peman-

faatan teknologi AI yang inklusif, berkelanjutan, aman dan bertanggung jawab, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah telah menyusun konsep pedoman Etika Kecerdasan Artifisial sebagai upaya untuk memperkuat dan mengembangkan kebijakan etika KA.

Saat ini sudah tersedia melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, rancangan awal dari Peta Jalan AI telah rampung pengerjaannya berdasarkan diskusi dengan sejumlah stakeholder terkait.

"Ada 7 pokja yang terlibat, dan setiap kali diskusi diikuti dengan cukup antusias oleh para stakeholder bisa mencapai 300-350 orang sekali diskusi, dan kita sudah melakukan rangkaian diskusi ini kurang lebih 21 kali pertemuan," ujar Nezar.

Nezar juga mengharapakan hasil dari perancangan Peta Jalan AI ini dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan dari para *stakeholder*. (man)



antara

Rencana Penyaluran 15 Ribu Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat

Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Kementerian Sosial memastikan rencana penyaluran lebih dari 15 ribu laptop untuk mendukung proses belajar siswa sekolah rakyat dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus atau awal September 2025.

Sepanjang 2024, 70 Ribu Akun Game di Indonesia Dibobol

JAKARTA, ID – Riset terbaru dari tim Kaspersky Digital Foot-print Intelligence (DFI) mengungkapkan 11 juta kredensial akun game bocor pada tahun 2024. Temuan Kaspersky menunjukkan bahwa 5,7 juta akun Steam dibobol oleh malware infostealer pada periode tersebut.

Jenis malware berbahaya ini juga menyebabkan kebocoran 6,2 juta akun yang terkait dengan platform game global lainnya, yaitu *Epic Games Store*, *Battle.net*, *Ubisoft Connect*, *GOG*, dan aplikasi EA.

Riset tersebut juga menganalisis kredensial Steam yang bocor di negara-negara Asia Pasifik. Berdasarkan data dari berkas log malware. Hampir 163.000 kredensial yang bocor adalah di negara Thailand, diikuti oleh Filipina dengan 93.000 kredensial.

Vietnam berada di posisi tiga teratas dengan hampir 88.000 kredensial bocor, dan Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan kebocoran hampir mencapai 70.000. Sebaliknya, jumlah terendah ditemukan di China, Sri Lanka, dan Singapura, masing-masing sekitar 19.000, 11.000, dan 4.000 kredensial.

"Penjahat siber sering kali merilis berkas log curian berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, setelah peretasan awal. Bahkan kredensial yang dicuri bertahun-tahun lalu dapat muncul kembali di forum dark web, yang berkontribusi pada semakin banyaknya informasi yang bocor. Akibatnya, jumlah akun game yang dibobol kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang langsung terlihat," kata Polina Tretyak, Analis Intelijen Jejak Digital di Kaspersky dalam keterangan persnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut laporan terbaru, lebih dari separuh gamer dunia berbasis di Asia Pasifik, dengan pasar seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Asean) berkontribusi pada dominasi ini.

Adopsi digital yang pesat di kawasan ini, penetrasi seluler yang meluas, dan permintaan yang didorong oleh kaum muda telah mendorong pertumbuhan eksponensial di seluruh segmen permainan kasual maupun kompetitif.

Dengan hampir 1,8 miliar pemain dan terus bertambah, ekosistem permainan di Asia Pasifik tidak hanya terbesar dalam hal volume, tetapi juga salah satu yang paling berpengaruh dalam membentuk tren dan perilaku permainan global. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kawasan ini dengan cepat menjadi sarang bagi kelas ancaman siber pencuri data.

"Penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa ancaman pencurian informasi tidak selalu langsung terlihat. Jika seseorang mencurigai telah diserang, menjalankan pemeriksaan keamanan dan menghapus malware adalah langkah pertama yang disarankan. Secara umum, memperbarui kata sandi secara berkala dan menghindari penggunaan ulang di berbagai platform dapat membantu mengurangi risiko pribadi," tutur Polina. (man)

Grab Buka Peluang Akselerasi Startup Lokal melalui Program GVV Batch 8

JAKARTA, ID – Laporan *Outlook Ekonomi Digital 2025* yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat bahwa investasi di sektor *startup* digital turun drastis hingga 66% pada tahun 2023. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian global yang berkepanjangan.

Meski demikian, potensi *startup* Indonesia tetap menjanjikan dan terus menarik minat investor. Selain perusahaan modal ventura, peran korporasi juga semakin besar, tercermin dari kontribusinya yang mencapai 34% terhadap total pendanaan *startup* di Indonesia.

Mencermati kondisi tersebut, Grab, *superapp* terkemuka di Asia Tenggara (Asean) menghadirkan program Grab Ventures Velocity (GVV) batch 8. Melalui program

ini, lima startup terpilih menjadi finalis untuk mengikuti program intensif yang mencakup mentorship mendalam bersama praktisi industri, integrasi ke dalam ekosistem digital Grab, implementasi *pitch project*, serta peluang *pitching* ke calon investor dan mitra strategis.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, Di tahun ke-8 penyelenggaraannya, pihaknya semakin terinspirasi oleh inovasi yang dihadirkan oleh para peserta.

"Di tengah tantangan yang dihadapi ekosistem *startup* seperti penurunan pendanaan dan tekanan ekonomi makro sejak *tech winter* 2022, melalui GVV, kami berkomitmen untuk memperkuat ekosistem *startup* lokal yang adaptif, berkelanjutan, dan siap *scale-up*. Melalui dukungan

kolaboratif dengan mitra strategis, kami percaya GVV dapat menjadi katalis pertumbuhan kemajuan *startup* di Indonesia," kata Neneng dalam keterangan persnya, Rabu (13/8/2025).

Neneng juga menuturkan, tercatat, sejak GVV diluncurkan di tahun 2018, 85% dari 40 *startup* yang telah mengikuti program ini berhasil membangun bisnis yang berkelanjutan dan terus bertumbuh, sebuah capaian yang melampaui rata-rata global.

Sehingga, dengan semangat kolaborasi dan visi keberlanjutan, Grab Ventures Velocity Batch 8 diharapkan menjadi langkah nyata bahwa di tengah tantangan industri, peluang tetap terbuka lebar.

"Kami berharap program ini semakin menegaskan pentingn-

ya kolaborasi lintas sektor dan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak untuk mendorong lahirnya *startup* yang mampu menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Indonesia," ujar Neneng.

Adapun dari total 180 pendaftar, lima startup yang berhasil lolos setelah melalui proses kurasi ketat, yaitu CASION (infrastruktur kendaraan listrik), Jejakin (*platform* manajemen karbon), Liberty Society (*up-cycling* limbah menjadi produk souvenir dan kampanye yang memberdayakan perempuan), Rekosisistem (layanan pengelolaan sampah domestik berbasis sirkular dan teknologi Extended Producer Responsibility/EPR), dan Sirsak (perusahaan pengelolaan sampah kemasan). (man)



CEO Prudential plc Anil Wadhvani (tiga dari kiri), CEO Regional John Cai (ketiga dari kanan), didampingi Presiden Direktur Prudential Indonesia Tony Benitez (dua dari kanan), dan Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin (kanan), foto bersama usai bertemu dengan Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono (dua dari kiri), dan Deputy Komisioner Pengawasan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila (kiri) di Jakarta, kemarin. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan top management Prudential dalam memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan utama di Indonesia, serta memperkuat peran Prudential dalam mendukung pertumbuhan di tanah air, guna mewujudkan perlindungan optimal di setiap kehidupan, untuk masa depan.

"Penyelundupan bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengancam industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyelundupan untuk beroperasi di wilayah Indonesia," jelas dia. **(ark)**

Perizinan Impor Daging Sapi Perlu Dipercepat

JAKARTA, ID—Pelaku usaha meminta pengurusan perizinan impor daging sapi oleh pemerintah dapat dipercepat. Sebab, keterlambatan pemberian izin impor daging sapi bisa menimbulkan efek berantai yang tidak baik, misalnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel, restoran, dan katering (horeka) karena industri itu sulit mendapatkan bahan baku. Saat ini, dari 86 perusahaan pemohon izin impor daging sapi, baru separuh yang mendapat persetujuan.

Permintaan itu disampaikan para pelaku usaha melalui Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana serta wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK. Para pelaku usaha sampai Agustus ini masih kesulitan mengimpor sisa kuota 100 ribu ton daging sapi. Mereka menilai hal itu lantaran proses pengeluaran Laporan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Kuota (LHVRK) di Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk ditindaklanjuti jadi Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang

cenderung lambat.

Teguh melihat adanya kecenderungan proses yang lambat terutama dalam memperoleh LHVRK yang dikeluarkan Bapanas untuk nantinya bisa memperoleh SPI di Kemendag. Selain itu, perusahaan yang telah memperoleh evaluasi dari Bapanas juga belum juga mendapat izin dari Kemendag, bahkan sampai melawati batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Padahal, keterlambatan pemberian izin impor daging sapi yang sudah ditetapkan dalam neraca komoditas itu tidak hanya bisa merugikan pengusaha, tapi juga konsumen. “Implikasi lebih jauh, jika industri kuliner yang punya kebutuhan besar tidak dapat bahan baku, seperti horeka, nasib pegawai terancam PHK,” kata Teguh.

Situasi itu membuat pengusaha gelisah. “Kalau mau dibilang apakah ini kegelisahan, ya memang pengusaha gelisah. Kalau mereka tidak mendapatkan barang untuk diimpor segera, itu karyawan yang banyak mau diapakan? Tidak ada solusi lain, kecuali (izin impor) harus direalisasikan,” papar Teguh dalam keterangan yang dikutip Rabu (13/08/2025).

Para pengusaha sudah menjalani proses perizinan sesuai prosedur berlaku. Namun, sampai kini, izin impor daging sapi reguler yang diharapkan belum dikeluarkan. Padahal, waktu tersisa tinggal beberapa bulan. Pengusaha khawatir jika persoalan itu tidak segera dituntaskan maka akan berdampak negatif terhadap proses importasi daging dan ini akan memberikan efek berantai.

Marina Ratna menambahkan, lambatnya proses pengurusan izin impor terbukti dari 86 perusahaan yang mengajukan, baru separuhnya yang sudah meraih izin berupa SPI dari Kemendag. “Setahu kami, baru sekitar 44 perusahaan yang sudah keluar SPI-nya. Dari anggota APPDI dan APPHI, masih ada 26 pelaku usaha yang belum keluar SPI, yakni 17 dalam proses di Kemendag dan sembilan di Bapanas,” kata Marina. Perusahaan yang mendapat SPI itu pun tergolong kecil volume impor yang diperolehnya, sekitar 200-600 ton. Mantan Direktur Utama PD Dharma Jaya tersebut mengatakan, separuh importir lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan besar, masih belum jelas perolehan izinnya. **(tl)**



Potensi Pertanian Bunga Sedap Malam

Petani memanen bunga Sedap Malam (polianthes tuberosa) di persawahan Desa Kertoharjo, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Bunga Sedap Malam digunakan untuk bahan baku parfum dan hiasan sekaligus pengharum ruangan yang banyak dibudidayakan oleh petani setempat karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, saat ini harganya Rp1.000 per batang dan bisa melonjak sampai Rp20 ribu per batang saat hari raya keagamaan.

Distribusi Beras SPHP Idealnya 10 Ribu Ton per Hari

JAKARTA, ID—Pemerintah meminta Perum Bulog mempercepat distribusi beras SPHP dengan menyasar pasar-pasar tradisional di wilayah-wilayah dengan kenaikan harga paling signifikan. Di sisi lain, volume penyaluran beras SPHP ke depan perlu ditingkatkan menjadi 10 ribu ton per hari dari saat ini hanya 2.500 ton per hari. Operasi pasar melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) telah dijalankan kembali oleh Bulog mulai pertengahan Juli dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2025 sebagai upaya mengendalikan harga beras di pasaran.

Oleh **Muhammad Farhan**

Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog mempercepat penyalutan beras SPHP lewat pasar. Pemerintah telah memutuskan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP secara bertahap hingga akhir tahun ini. Operasi pasar untuk beras SPHP akan lebih cepat apabila dilakukan melalui para pengecer di pasar-pasar. Pemerintah melalui Kemenko Pangan telah melakukan kunjungan ke beberapa pasar untuk meninjau langsung pelaksanaan penyaluran beras SPHP tersebut. Hasilnya, tata niaga beras SPHP telah terlaksana dengan baik dan pasar merupakan tempat penyaluran yang paling tepat. “Saya keliling juga ke beberapa pasar, tetapi beras SPHP-nya belum sampai karena perlu waktu untuk menyiapkan. Karena itu, kami minta (ke Bulog) beras SPHP itu masuknya ke pasar. Kalau kita masukkan melalui bazar, itu lambat sekali, bazar itu lambat,” ungkap Menko Pangan usai memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Perberasan di Jakarta, Rabu (13/08/2025). Menko Zulkifli menuturkan, pemerintah memang

telah memutuskan untuk menyalurkan sekitar 1,3 juta ton beras SPHP secara bertahap sepanjang Juli-Desember 2025. Saat ini, pemerintah baru bisa menyalurkan sekitar 2.500 ton per hari. “Kalau bisa 10 ribu (ton) sehari, sehingga satu bulan dapat mencapai 300 ribu ton,” ujar dia. Menko Pangan optimistis angka penyaluran beras SPHP tersebut bisa ditingkatkan apabila sudah memasuki masa panen raya kedua tahun ini sekitar September. “Sekarang sudah bisa 2.500 ton, kalau 2.500 ton itu masih sedikit, kita menunggu panen gadu. Panen gadu itu bulan depan, September. Ini masih ada tiga minggu (lagi) September sudah panen gadu, sudah banyak lagi itu,” jelas dia. Saat ini, stok beras di Bulog masih sangat cukup untuk menstabilkan harga di pasaran. “Kami memastikan bahwa saat ini stok beras di gudang Bulog masih dalam kondisi aman, yakni sekitar 3,9 juta ton,” tandas dia.

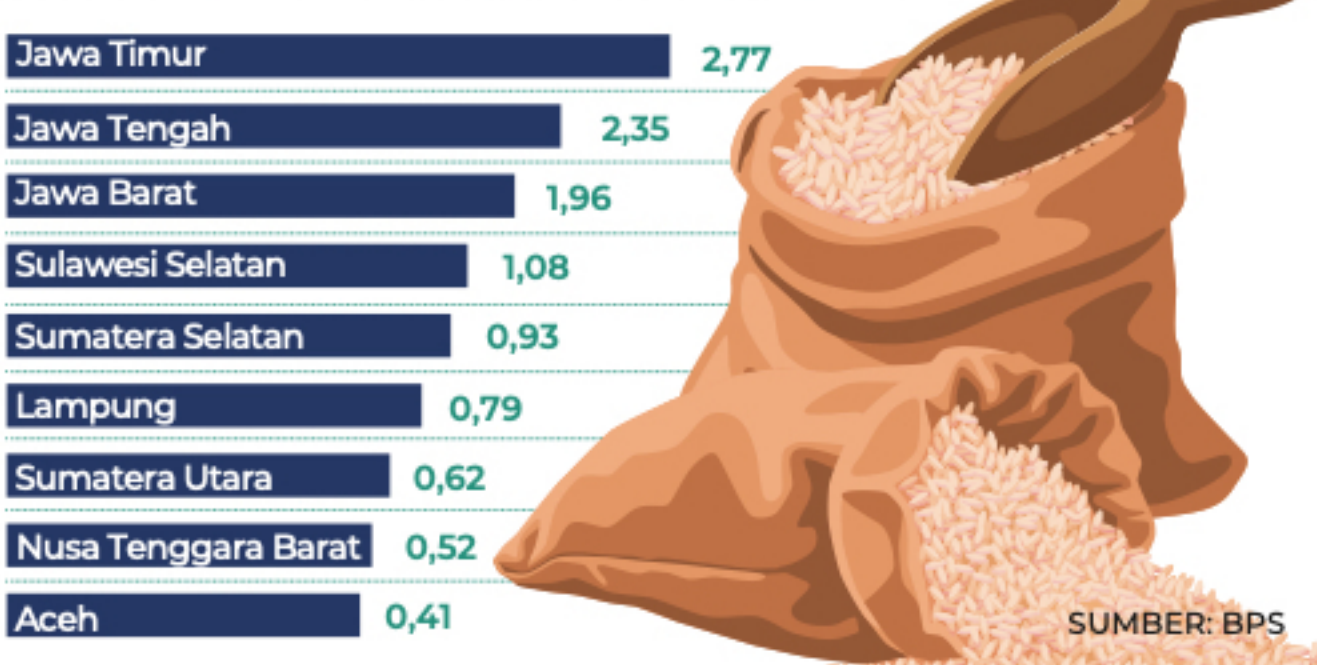
Skema Penyaluran

Sedangkan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, Bulog menyiapkan sejumlah skema percepatan penyaluran beras SPHP guna mengintervensi harga. Dalam penyaluran beras SPHP itu, yang pertama tentunya ke

Provinsi Produsen Beras Terbesar di Indonesia

(dalam juta ton)

Wilayah dengan Jumlah Produksi Beras Tertinggi di Indonesia, 2024. Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Timur mencatatkan jumlah produksi beras tertinggi di Tanah Air, yakni mencapai 2,77 juta ton.



pengecer-pengecer di pasar. “Mereka menggunakan aplikasi SPHP, jadi pengecer-pengecer tersebut itu harus mengikuti aturan SPHP,” kata dia. Beras SPHP juga didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, penyaluran melalui koperasi pada kementerian/lembaga (K/L) pemerintah lainnya. “K/L itu ada koperasi-koperasinya, termasuk TNI/Polri ada koperasinya. Selain itu, teman-teman BUMN, seperti PT Pos, ID Food, PTPN, itu juga ada koperasinya,” tutur dia. Bulog juga siap menyalurkan beras SPHP ke toko-toko ritel modern di seluruh Indonesia.

Beras SPHP sejak Juli-pekan pertama Agustus 2025 tersalurkan 18.500 ton.

Terkait harga eceran tertinggi (HET) beras terbaru bagi beras umum (reguler), kata Menko Pangan, kebijakan itu masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Menko Pangan segera melapor ke Presiden terkait perubahan HET dalam rangka menyederhanakan kelas mutu beras dari premium-medium menjadi umum-khusus. Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi penetapan beras satu harga dan itu harus berdasarkan persetujuan Presiden. “Kami sudah rapat, tentu nanti kami lapor dulu ke Presiden,” ujar dia. Kepala Badan Pangan

Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, perubahan HET beras tidak bisa diputuskan tergesa-gesa, mengingat isu beras sensitif sehingga kebijakan yang diterapkan harus mengkomodifikasi hulu-hilir. “Jangan sampai enggak *balance* hulu sama hilir. Kelihatannya cuma naik Rp 100, Rp 200, Rp 500, tapi ini untuk 280 juta orang. Jadi enggak boleh salah dalam memutuskan,” jelas Arief.

Lindungi Penggilingan

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menjawab keresahan para pengusaha penggilingan padi seiring mencuatnya isu beras premium tidak sesuai standar mutu yang kini penegakan hukumnya terus berjalan. Berdasarkan laporan Ombudsman RI, gudang penggilingan padi di Tanah Air banyak yang kosong sehingga tidak memiliki stok gabah maupun beras akibat kekhawatiran para pelaku usaha atas polemik kebijakan tata niaga peberasan. “Selama tidak menipu, tidak usah khawatir,” kata Menko Pangan. Pemerintah tidak akan menindak para pengusaha penggilingan padi selama patuh pada aturan tata niaga beras. Sebaliknya, bagi para pelaku yang melanggar hukum, pemerintah tidak segan menindaknya. “Pemerintah

akan menindak tegas yang benar-benar melanggar hukum, yang menipu, janjinya A tapi jualnya C. Pelaku usaha penggilingan yang bekerja sesuai aturan tentu akan dilindungi, enggak usah khawatir,” ungkap Menko Pangan.

Sedangkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, usai kasus beras premium dijual tidak sesuai standar mutu, terjadi pergeseran struktur pasar beras di Indonesia. Konsumen kini cenderung beralih dari pasar modern ke pasar tradisional dan eceran yang pasokannya dari penggilingan kecil dan menengah sehingga penjualan mereka pun naik. “Yang terjadi saat ini adalah pesta penggilingan kecil karena pasokan melimpah. Terjadi hukum pasar. Pemerintah ingin agar usaha kecil tidak tertindas agar ekonomi kerakyatan tetap berjalan,” papar dia. Belakangan, stok beras di pasar tradisional melimpah, memberi keuntungan bagi penggilingan kecil dan pedagang. Kondisi ini positif karena mendorong transparansi harga, memperkuat pelaku usaha kecil, serta tetap menjamin ketersediaan stok beras. Para pedagang dan penggilingan kecil juga menilai situasi itu jadi berkah yang membuat mereka lebih optimistis. **(IDTV/BTV/ID/B1/ant/tl)**

Dana US\$ 103 Juta dari GCF untuk Aksi Iklim di 38 Provinsi

JAKARTA, ID—Indonesia berhasil memperoleh pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) US\$ 103,8 juta untuk program percontohan Pembayaran Berbasis Hasil (Results-Based Payment/RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang berfokus pada pengurangan emisi sektor kehutanan. Dari total pendanaan itu, alokasi US\$ 93,4 juta digunakan untuk Output 2 dari proyek RBP REDD+ GCF yang dimulai Juli 2023 dan direncanakan selesai 2030. Dana itu diharapkan dapat mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di 38 provinsi di RI, baik di tingkat lokal

maupun nasional.

Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/Kepala BPLH) Diaz Hendropriyono, dana US\$ 103,8 juta dari GCF itu diberikan atas keberhasilan RI menurunkan 20,25 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) pada 2014-2016. Indonesia menerima pendanaan dari GCF tersebut untuk percepatan mitigasi perubahan iklim. Wamen Diaz mengapresiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) atas komitmennya dalam mengelola sumber pendanaan iklim dari luar APBN serta mendistribusikannya

hingga tingkat subnasional dan masyarakat. “Pendanaan iklim di Indonesia menghadapi tantangan besar, yakni gap antara kebutuhan pendanaan yang sangat besar dan jumlah dana tersedia. Karena itu, penyaluran dana RBP REDD+ dari GCF ini diharapkan dapat membawa dampak nyata untuk aksi iklim di daerah,” kata Wamen Diaz dalam keterangan yang dikutip Rabu (13/08/2025).

Wamen Diaz mengatakan itu saat Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana dan *Talkshow* Implementasi Proyek RBP REDD+ for Results Period 2024-2016 GCF Output 2 di Jakarta pada

7 Agustus 2025. Pemerintah RI berkomitmen terus memperkuat inisiatif mitigasi perubahan iklim. Salah satu langkah nyata yang ditempuh melalui REDD+ atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Program ini menempatkan hutan sebagai garda terdepan pengendalian perubahan iklim, dengan harapan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim lebih luas. “Karena itu, kita harus membuktikan dana yang sudah diberikan GCF terdistribusi dan ada *impact*-nya. Kita harus bertanggung jawab atas dana yang diberikan. Kemen-

terian LH bersama BPD LH akan melihat dari sisi akuntabilitas agar kita dilihat sebagai bangsa yang berintegritas dan punya *impact* terhadap perubahan iklim,” kata Wamen Diaz dalam sambutannya.

Sebagai tindak lanjut, BPD LH sebagai lembaga pengelola dana GCF, telah menyalurkan dana ke 15 provinsi, yakni Jatim, Bali, Riau, Kalsel, Jabar, Papua Barat Daya, Jateng, Sumsel, NTT, DIY, Sulut, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumbar, dan Kalbar. Penyaluran dana itu dengan alokasi lebih dari Rp 251 miliar, memiliki durasi berbeda-beda antara 1-4 tahun atau

sesuai kebutuhan masing-masing provinsi. Untuk mendukung kelancaran proyek, delapan lembaga perantara telah ditunjuk untuk membantu pengelolaan dana dan fasilitasi proyek tersebut. Proses penyaluran dana ini dimulai resmi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPD LH dan delapan lembaga perantara yang disaksikan Wamen LH, Sekjen Kementerian Kehutanan, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, serta perwakilan gubernur dan pimpinan organisasi pemerintahan daerah dari 15 provinsi penerima manfaat. **(tl)**

FLNG Terbesar Indonesia Beroperasi Kuartal III 2027

JAKARTA, ID - Kilang gas alam cair terapung atau *Floating Liquefied Natural Gas* (FLNG) terbesar di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal ketiga 2027.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok untuk meninjau langsung pembangunan fasilitas Floating Liquefied Natural Gas (FLNG), kemarin.

dok. ESDM

Oleh **Rangga Prakoso**

Fasilitas dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun ini dengan nilai investasi sekitar US\$ 963 juta.

FLNG ini nantinya akan mengolah gas dari Lapangan Asap Kido Merah (AKM) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. AKM yang dioperasikan oleh Genting Oil Kasuri direncanakan memproduksi gas mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) mulai 2027.

Pembangunan FLNG berlangsung di galangan kapal Wison New Energies, Nantong, China. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok untuk meninjau langsung pembangunan FLNG tersebut. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi Bahlil ke lapangan AKM pada Juni 2025 lalu, yang menekankan pentingnya memvalidasi progres pembangunan FLNG.

Bahlil mengatakan pembangunan FLNG ini ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2027 dan mulai beroperasi di Fakfak pada kuartal kedua hingga ketiga di tahun yang sama. "Fasilitas LNG Terapung ini diperkirakan selesai pada awal 2027, dan akan mulai berproduksi di Papua Barat beberapa bulan setelahnya," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Pembangunan FLNG ini berawal dari kesepakatan yang ditandatangani pada Juni 2024 antara Genting Group melalui anak usahanya, PT Layar Nusantara Gas, dan Wison New Energies. Wison Nantong Yard merupakan fasilitas galangan kapal yang beroperasi sejak 2006 di Kawasan Industri Teknologi Tinggi Nantong, Provinsi Jiangsu, sekitar 135 km dari kantor pusat Wison di Shanghai. Fasilitas ini khusus membangun struktur terapung seperti hull Floating LNG dan tangki SPB (Self-supporting Prismatic Type B), serta menyediakan layanan EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation, Commissioning).

Dengan kapasitas produksi

Fasilitas LNG Terapung ini diperkirakan selesai pada awal 2027, dan akan mulai berproduksi di Papua Barat beberapa bulan setelahnya.

Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM

hingga lima unit per tahun, Nantong Yard mampu merakit FLNG, kapal pengangkut LNG, FSRP (Floating Storage Regasification Power barge), sekaligus mengeksport modul dan tangki besar secara massal.

Ia menekankan pentingnya melibatkan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek energi di Papua Barat. Dalam dialog dengan jajaran pelaksana proyek, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan proyek

strategis seperti Asap, Merah, dan Kido harus membawa manfaat yang luas, termasuk bagi pelaku usaha lokal. "Kalau bisa pengusahanya jangan hanya satu bendera ya. Berbagi dengan yang lain, agar tidak ada kecemburuan," ujar nya.

Ia juga mengingatkan agar perusahaan pelaksana tidak hanya mengandalkan mitra kerja dari Jakarta, namun turut memberi ruang bagi kontraktor dan tenaga kerja dari Papua dan daerah sekitar proyek. "Jangan semua dari Jakarta terus. Libatkan pengusaha lokal, beri mereka kesempatan untuk bertumbuh. Ini tanah mereka juga," tegasnya.

Proyek Asap, Merah, dan Kido telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak November 2023. Dengan nilai investasi sebesar US\$ 3,37 miliar, proyek ini diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan negara hingga US\$ 2,01 miliar, serta menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja saat konstruksi dan 200 tenaga kerja saat operasional, dengan komitmen 80% berasal dari Orang Asli Papua.

Bahlil menuturkan Kabupaten Teluk Bintuni dikenal sebagai lumbung energi nasional karena

memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia. Kabupaten ini akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2025.

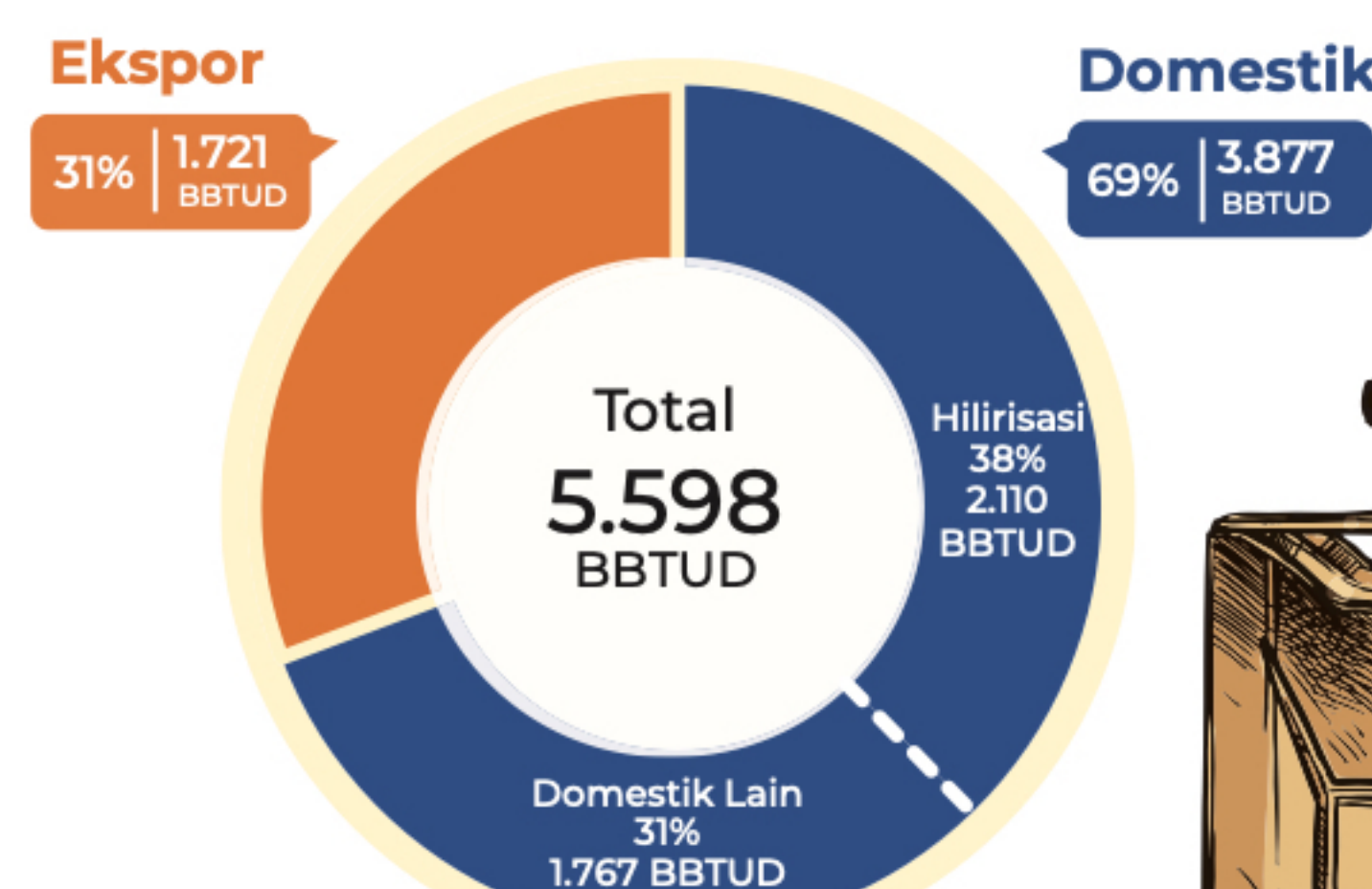
Saat menghadiri perayaan HUT ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni di Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (12/6/2025), Bahlil memastikan komitmen pemerintah untuk Teluk Bintuni dan Fakfak. "Saya datang untuk mengunjungi Genting Oil dan BP Tangguh. Pada 2027 saya pastikan penambahan dana bagi hasil untuk Bintuni dan Fakfak. Sudah mulai keluar pada 2027 akhir," ujar Bahlil.

Bahlil juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun. Menurutnya, angka ini terbilang jumbo untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.

"Bedanya, Pak Gubernur Rp3,5 triliun mengelola 7 kabupaten. Pak Bupati 24 distrik," ujar Bahlil.

Pemanfaatan Gas Bumi Hingga Semester I 2025

Hilirisasi : industri dan pupuk
Domestik lain : BBC, Jargas, Peningkatan Produksi Migas, Ketenagalistrikan, LNG, dan LPG.



BBTUD: Billion British Thermal Unit Per Day
BBC: Bahan Bakar Gas
LNG: Liquefied Natural Gas
LPG: Liquefied Petroleum Gas

SUMBER: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SKK Migas Kawal Pengembangan Lapangan PHE ONWJ

JAKARTA, ID - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengawal ketat pengembangan lapangan migas OO-OX, salah satu proyek strategis nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana mengatakan penyelesaian berbagai proyek migas yang strategis diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi minyak dan gas bumi nasional dengan mengkonversi cadangan menjadi produksi.

"Terutama dalam menahan laju penurunan alamiah produksi migas melalui berbagai aktivitas pemeliharaan dan pengembangan, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi," kata Taufan dikutip kantor berita Antara di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Untuk melakukan pengawasan pengembangan lapangan tersebut, Senior Manager Project Management SKK Migas Kosario M.Kautsar bersama jajaran manajemen dari Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa mengunjungi Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ).

SKK Migas menyoroti capaian progres proyek yang ditargetkan menembus angka 70% pada kuartal I 2026, di tengah tantangan akhir tahun seperti libur Natal dan Tahun

Baru, serta Hari Raya Idulfitri yang berpotensi memperlambat ritme kerja.

Project Manager PHE ONWJ Mohamad Abdurrafiq yang mendampingi kunjungan SKK Migas menegaskan komitmen Pertamina dalam menjaga keselamatan kerja, mempercepat proses konstruksi, serta terus mengulirkan inovasi dan optimasi lintas sektor demi efisiensi operasi yang maksimal. "Proyek OO-OX, bukan sekadar pekerjaan proyek biasa, tapi menjadi denyut nadi baru bagi energi Indonesia," ujarnya.

Pengembangan Lapangan OO-OX meliputi instalasi platform lepas pantai OOA, pengeboran empat sumur pengembangan, yaitu OOA-1, OOA-2, OOA-3, dan OOA-4.

Lapangan OO-OX diestimasikan mampu menghasilkan tambahan 2.996 barel minyak per hari (BOPD), dan 21,26 juta standar kubik gas per hari (MMSCFD) ketika mulai berproduksi pada kuartal pertama 2026.

Kini, anjungan OOA Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) telah berdiri di Laut Utara Jawa Barat. Selanjutnya, proyek Pengembangan Lapangan OO-OX tengah memasuki fase penyambungan dan pemendaman pipa dengan dukungan Kapal PLB Kalinda, serta persiapan konstruksi di OFF Balongan. Kemudian, dilanjutkan dengan pengeboran sumur-sumur OOA oleh tim drilling perusahaan. **(rap)**

Pertamina Manfaatkan Limbah Organik Program MBG

JAKARTA, ID - PT Pertamina Patra Niaga, melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menginisiasi pemanfaatan limbah organik dari program makan bergizi gratis (MBG) sebagai pakan alternatif untuk peternakan masyarakat.

Aviation Fuel Terminal Manager Hasanuddin Pertamina Patra Niaga Andreas Yanuar Arinawan, mengatakan inisiatif tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi sirkular berbasis komunitas yang terintegrasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Limbah organik yang dihasilkan dari dapur satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG) kini tidak lagi menjadi sisa buangan yang mencemari lingkungan. Saat ini, sebanyak tiga SPPG telah menjalin kerja sama dalam pengelolaan limbah tersebut, yaitu Mandai Bontoa 1, Mandai Bontoa 2, dan Biringkanaya Bakung 1 di Kabupaten Maros, Sulsel.

Setiap hari secara rutin, limbah yang diangkut berkisar antara 100 hingga 150 kilogram. Limbah dapur tersebut dipilah, ditimbang, dan diangkut secara profesional oleh tim Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Baji Mangngai menuju lokasi peternakan bebek milik Kelompok Laleng Kassie di Dusun Tamarunang, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Kelompok peternak yang telah bersama Pertamina Patra Niaga sejak 2021 ini mendapatkan pendampingan berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Mereka kini menjadi contoh sukses pemanfaatan limbah organik untuk mendukung usaha peternakan

masyarakat secara berkelanjutan. "Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung program makan siang bergizi gratis, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui inisiatif ini, kami menghadirkan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi limbah organik, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional kami," kata Andreas dikutip dari kantor berita Antara, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Sejak program ini berjalan, Kelompok Laleng Kassie mampu memproduksi ratusan butir telur bebek segar setiap minggu secara konsisten. Kelompok ini juga telah berhasil melakukan diversifikasi produk dengan mengolah telur menjadi telur asin berkualitas tinggi. Produk olahan ini memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan masa simpan yang lebih lama, sehingga turut meningkatkan pendapatan kelompok secara signifikan.

Ketua Kelompok Laleng Kassie Maryama menyampaikan perkembangan dan manfaat yang telah didapat masyarakat semenjak berlangsungnya program. "Program ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam mendukung keberlangsungan usaha peternakan yang kami kelola bersama masyarakat. Pemanfaatan limbah makanan dari program makan bergizi gratis ini benar-benar membantu kami menekan biaya operasional, terutama biaya pakan yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar," ujar Maryama.

Lebih lanjut, sebagian limbah makanan yang tidak langsung digunakan sebagai pakan bebek juga dimanfaatkan untuk budi daya maggot. **(rap)**

China Gelontorkan Stimulus Konsumsi

BEIJING, ID – Pemerintah China melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan dua program baru untuk memberikan subsidi bunga pinjaman, baik bagi individu maupun pelaku usaha sektor jasa, guna mengurangi biaya kredit konsumsi bagi penduduk, membantu mengoptimalkan potensi belanja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas.

Ada pun batas maksimum yang berikan adalah sebesar 3.000 yuan (US\$ 417,5) per orang. Ini merupakan program pertama untuk pinjaman konsumsi pribadi, yang mana mulai 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2026, warga yang memenuhi syarat dapat memperoleh subsidi bunga hingga 3.000 yuan.

Pinjaman yang mendapat subsidi harus benar-benar digunakan untuk konsumsi, dapat diverifikasi melalui rekening pencairan, dan tidak termasuk penggunaan kartu kredit.

Sementara program kedua adalah subsidi bunga pinjaman bagi delapan sektor jasa, yakni katering dan akomodasi, kesehatan, perawatan lansia, penitipan anak, layanan rumah tangga, budaya dan hiburan, pariwisata, serta olahraga. Pinjaman yang memenuhi syarat harus dicairkan

antara 16 Maret-31 Desember 2024, dan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur konsumsi atau kapasitas layanan.

Para peminjam dapat menerima potongan bunga satu persen per tahun selama maksimal satu tahun, dengan biaya ditanggung 90% oleh pemerintah pusat dan 10% oleh pemerintah provinsi. Nilai pinjaman yang disubsidi maksimal 1 juta yuan (sekitar US\$ 140.000).

Menurut Kemenkeu China, kedua program itu merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mendorong konsumsi di sektor jasa dan menciptakan penggerak pertumbuhan baru. Ini mengingat, sektor konsumsi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi China.

Meski pasar konsumsi China tahun ini memulih, kondisinya masih rapuh karena permintaan tetap lemah. Menurut seorang analis, rencana subsidi baru ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dukungan dan Implementasi

Bank-bank besar, seperti China Construction Bank, Bank of China, Bank of Communications, dan Agricultural Bank of China, segera menyatakan dukungan dan menyiapkan langkah



Investor Daily/AP Photo/Andy Wong

Stimulus Konsumsi

Pengunjung dan turis menyaksikan persiapan latihan untuk parade militer di distrik belanja dekat jalan Chang'an di Beijing, China, pada Sabtu (09/08/2025). Pemerintah China pekan ini menggelontorkan stimulus konsumsi untuk mendorong belanja dalam negeri.

implementasi. Bank of China, misalnya, akan mulai memberikan subsidi pinjaman konsumsi pribadi yang memenuhi syarat pada 1 September 2024.

“Langkah ini merupakan eksperimen inovatif dukun-

gan fiskal dan keuangan yang terkoordinasi untuk mendorong konsumsi domestik. Subsidi ini dapat digabungkan dengan program tukar tambah barang konsumsi yang sudah ada, seperti peralatan rumah tangga

dan mobil,” ujar Wakil Menteri Keuangan China Liao Min, dalam konferensi pers Rabu (13/08/2025).

Di sisi lain, regulator perbankan tetap melakukan pengawasan terhadap program ini

untuk melindungi peminjam dan memastikan subsidi tepat sasaran. Ada pun sektor-sektor yang menjadi target, termasuk kesehatan, pariwisata, budaya, dan olahraga – sebagai industri penting yang ingin diubah China menjadi mesin pertumbuhan baru.

Song Xiangqing, wakil presiden China Commerce Economy Association atau Asosiasi Ekonomi Perdagangan China, menyebut paket ini sebagai instrumen presisi untuk menstimulasi perekonomian.

“Dengan menurunkan biaya pembiayaan bagi penyedia jasa, kebijakan ini dapat mempercepat konsumsi domestik dengan memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik,” ujarnya kepada *Global Times*.

Song menambahkan, pemerintah berupaya mempercepat aktivitas industri maupun konsumsi. Subsidi bunga untuk perusahaan jasa diharapkan bertindak sebagai akselerator guna meningkatkan kualitas dan efisiensi, selain memperbaiki layanan dan mempertajam daya saing industri.

Dong Ximiao, kepala peneliti di Merchants Union Consumer Finance Co, mengatakan bahwa rencana subsidi bakal mengurangi biaya pembiayaan sektor jasa, mendorong belanja konsumen serta pertumbuhan ekonomi. **(sumber lain/pya)**

Pembebasan Sandera Disertai Penarikan Pasukan Israel

YERUSALEM, ID – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (12/08/2025)

mengisyaratkan bahwa upaya gencatan senjata di Jalur Gaza kini diarahkan pada kesepakatan komprehensif yang mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa sekaligus, bukan secara bertahap.

Oleh **Happy Amanda Amalia**

Menurut pejabat Arab Saudi yang dikutip *Associated Press* (AP) pekan lalu, mediator dari Mesir dan Qatar sedang menyiapkan kerangka baru untuk kesepakatan. Yang akan mencakup pembebasan seluruh sandera, dengan imbalan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sebelumnya, pembicaraan tidak langsung yang sudah berlarut-larut berujung pada kegagalan bulan lalu. Namun pada Selasa, media Mesir *Qahera* melaporkan bahwa delegasi Hamas telah tiba di Kairo untuk melanjutkan pembahasan gencatan senjata. Ini menjadi pertanda bahwa negosiasi belum sepenuhnya buntu, meskipun perang telah berlangsung 22 bulan.

Israel sendiri mengancam memperluas serangan militer ke wilayah Gaza yang belum mereka kuasai. Rencana ini langsung memicu kecaman internasional dan kritik dalam negeri, sekaligus dianggap sebagai

upaya menekan Hamas agar menghentikan gencatan senjata.

Saat ini, militan masih menahan sekitar 50 sandera yang diculik dalam serbuan 7 Oktober 2023. Israel memperkirakan sekitar 20 di antaranya masih hidup.

Dalam wawancara dengan televisi Israel *i24 News*, Netanyahu sempat ditanya apakah peluang untuk gencatan senjata sebagian sudah tertutup. Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty mengatakan pihaknya masih mendorong proposal lama, yakni gencatan senjata awal 60 hari, pembebasan sebagian sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan sebelum negosiasi lanjutan.

“Saya pikir itu sudah lewat. Kami sudah mencoba berbagai cara, namun mereka hanya menesatkan kami. Saya ingin mereka semua, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, dibebaskan sekaligus,” ujar Netanyahu, seperti dikutip *AP* pada Rabu (13/08/2025).

Netanyahu juga menegaskan, perang hanya akan berakhir jika seluruh sandera dibebaskan dan Hamas menyerah. Ia menambahkan

Israel akan tetap mempertahankan kontrol keamanan atas Gaza.

Di sisi lain, Hamas tetap pada posisi awal bahwa pembebasan seluruh sandera hanya bisa dilakukan jika Israel membebaskan tahanan Palestina, menyetujui gencatan senjata permanen, dan menarik pasukannya dari Gaza. Hamas juga menolak menyerahkan senjata seperti yang dituntut Israel.

Kelaparan dan Malnutrisi

Pada Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengingatkan bahwa tingkat kelaparan dan malnutrisi di Gaza kini mencapai titik tertinggi sejak perang dimulai.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengutip data Program Pangan Dunia (WFP), mengatakan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lima kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir. Secara total, 121 orang dewasa dan 101 anak meninggal akibat malnutrisi selama perang.

“Dengan latar belakang ini, pasokan kemanusiaan yang masuk ke Gaza masih jauh di bawah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang sangat besar,” katanya.

Dujarric menjelaskan lebih lanjut bahwa PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya melakukan segala upaya untuk membawa bantuan ke Gaza. Tetapi masih menghadapi penundaan dan hambatan signifikan dari pihak berwenang Israel yang mencegah distribusi skala besar makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

Sejak serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menculik 251 orang, Israel melancarkan serangan balasan melalui udara dan darat yang menghancurkan sebagian besar Gaza, mengusir jutaan warga, dan mendorong wilayah itu ke ambang kelaparan.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 61.400 korban tewas, sekitar separuhnya perempuan dan anak-anak. Namun Israel membantah angka tersebut, juga tidak memberikan data alternatif yang dimilikinya.

Serangan Militan

Dalam perkembangan terpisah, militer Israel menyatakan telah me-

nyerang sekelompok militan di Gaza yang menyamar sebagai pekerja bantuan dan menggunakan mobil berlogo badan amal internasional World Central Kitchen.

Militer mengatakan serangan dilakukan setelah memastikan kepada pihak World Central Kitchen bahwa kendaraan dan orang-orang tersebut tidak berafiliasi dengan mereka. Organisasi amal itu mengonfirmasi hal yang sama, dan mengecam keras tindakan penyamaran yang membahayakan warga sipil dan pekerja bantuan.

World Central Kitchen, yang didirikan pada 2010, dikenal mengirim tim penyedia makanan cepat tanggap di zona konflik dan bencana alam. Pada April 2025, tujuh pekerjajaya tewas akibat serangan Israel di Gaza. Israel pun mengakui kesalahan tersebut dan melakukan penyelidikan.

Kasus serupa sempat terjadi pada November 2023 menewaskan lima orang, termasuk seorang pekerja World Central Kitchen yang menurut Israel terlibat dalam serangan Hamas - klaim yang tidak diketahui pihak amal tersebut. **(ap)**

Vietnam Berambisi Jadi Macan Asia Berikutnya

HANOI, ID – Vietnam menargetkan jadi negara kaya pada 2045 dan bertransformasi menjadi “Macan Asia” berikutnya, seperti Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan. Istilah tersebut kerap digunakan sebuah negara untuk menggambarkan kebangkitannya, khususnya di bidang ekonomi.

Akhir tahun lalu, Ketua Partai Komunis To Lam mendeklarasikan datangnya “era baru pembangunan”. Pidato ini juga sekaligus menandakan peluncuran perombakan ekonomi Vietnam yang ambisius dalam beberapa dekade terakhir.

Namun perjalanannya tidak mudah, karena Vietnam harus menyelaraskan pertumbuhan dengan reformasi yang tertunda, populasi yang menua, risiko iklim, serta tekanan eksternal, termasuk dari Presiden Amerika Serikat (AS)

Donald Trump terkait surplus perdagangan Vietnam dengan AS.

Perubahan ekonomi Vietnam dalam 30 tahun terakhir pun sangat mencolok. Pada 1990, pendapatan rata-rata penduduk hanya setara US\$ 1.200 per tahun. Kini, angka itu naik lebih dari 13 kali lipat menjadi US\$ 16.385.

Vietnam bertransformasi Vietnam menjadi pusat manufaktur global dengan jalan raya baru nan mulus, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, dan kelompok kelas menengah yang berkembang pesat sehingga mampu mendongkrak jutaan penduduknya dari kemiskinan, mirip dengan China.

Namun, *booming* ekspor berbiaya rendah yang dipimpin oleh Vietnam sedang melambat dan negara ini menghadapi tantangan yang makin besar untuk melakukan reformasi yang

diusulkan akibat perubahan iklim – mulai dari memperluas industri swasta, memperkuat perlindungan sosial dan berinvestasi di bidang teknologi dan energi ramah lingkungan.

“Semuanya harus bergerak bersama. Kita tidak bisa membuang waktu lagi,” kata Mimi Vu dari konsultan Raise Partners, seperti dikutip *AP* pada Rabu (13/08/2025).

Investasi di Vietnam dilaporkan mengalami lonjakan, yang sebagian didorong oleh oleh ketegangan perdagangan AS-China, dan AS sekarang menjadi pasar ekspor terbesar Vietnam dengan surplus perdagangan mencapai US\$ 123,5 miliar pada 2024.

Kondisi ini memicu kemarahan Trump, yang mengancam tarif impor hingga 46%. Negosiasi akhirnya menghasilkan kesepakatan tarif sekitar 20%,

meski masih ada perdebatan terkait kandungan produk asal China dalam ekspor Vietnam.

Mantan duta besar AS untuk Vietnam Daniel Kritenbrink mengatakan bahwa selama negosiasi dengan pemerintahan Trump, fokus Vietnam adalah pada tarifnya dibandingkan dengan tarif negara-negara tetangga dan pesaingnya.

“Selama mereka berada di zona yang sama, di wilayah yang sama, saya rasa Vietnam dapat menerima hasil itu,” katanya.

Vietnam telah bersiap mengubah kebijakan ekonominya, bahkan sebelum tarif Trump mengancam modelnya dalam menghasilkan ekspor berbiaya rendah untuk dunia. Pemerintah tampaknya menyadari model jebakan negara berpenghasilan menengah, di

mana ekonomi cenderung stagnan tanpa adanya reformasi besar-besaran.

Berbeda dengan Korea Selatan, Taiwan, atau Singapura yang fokus pada satu sektor unggulan, ekonomi Vietnam kini lebih kompleks dan tidak bisa mengandalkan hanya pada manufaktur murah.

“Vietnam harus berani mengambil beberapa taruhan besar,” tutur RMAC McClellan, pendiri RMAC Advisory.

Pemerintah Vietnam sendiri telah menargetkan pertumbuhan lewat teknologi tinggi, infrastruktur berbiaya rencana kereta cepat senilai US\$ 67 miliar yang memangkas perjalanan Hanoi-Ho Chi Minh menjadi 8 jam), membangun pusat keuangan khusus di Ho Chi Minh City dan Danang untuk menarik investor asing, serta reformasi kelembagaan. **(ap/pya)**

Gerus Parkir Liar, Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi JakParkir

JAKARTA, ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi JakParkir. Aplikasi JakParkir tersebut sudah dapat diinstal melalui Playstore untuk pengguna ponsel Android dan App Store untuk pengguna iPhone.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, peluncuran aplikasi JakParkir adalah sebagai upaya menggerus praktik parkir liar yang meresahkan masyarakat.

"Salah satu usaha (cegah parkir liar) harus tetap dilakukan, apapun sistemnya, ya," kata Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/8).

Selain itu, dengan JakParkir masyarakat bisa mengetahui lokasi parkir resmi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Kita bisa menghitung dengan jelas area parkir berapa banyak, *sih*. Itu juga salah satu teknologi, dan teknologi itu nggak bisa hindari,

harus kita praktekan," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menerangkan, saat ini aplikasi JakParkir sudah diimplementasikan di delapan ruas jalan.

Delapan ruas jalan itu meliputi: Jl. Pegambiran (Jakarta Timur), Jl. Cikini Raya (Jakarta Pusat), Jl. Juanda Raya (Jakarta Pusat), Jl. Raden Patah (Jakarta Selatan), Jl. Adityawarman (Jakarta Selatan), Jl. Tebah Raya

(Jakarta Selatan), Jl. Sunan Ampel (Jakarta Timur), Jl. Muara Karang Raya (Jakarta Utara).

Selain itu, sambung Syafrin, aplikasi JakParkir sedang proses integrasi pada tiga ruas jalan di Jakarta Barat yakni, Japan Petongkangan, Jalan Pintu Kecil, dan Jalan Perniagaan Timur.

Syafrin menambahkan, aplikasi JakParkir memiliki empat *interface*, yakni versi Pengguna Jasa Parkir,

versi Juru Parkir, versi Pengawas, dan *Dashboard Command Center*.

Aplikasi JakParkir memiliki fitur pembayaran parkir secara *cashless*, mendukung penerapan tarif parkir progresif, dan pemesanan slot parkir.

"Pembayaran parkir menggunakan aplikasi JakParkir dilakukan secara non tunai (*cashless*) dengan menggunakan Kartu Uang Elektronik dan QRIS," kata Syafrin. (**disway.id**)

Menkum: Jangan Dahulukan Jalur Pidana dalam Persoalan Royalti

JAKARTA, ID – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengimbau semua pihak, khususnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), untuk jangan mendahulukan jalur pidana dalam persoalan tata kelola royalti.

Oleh Totok HS

“Jangan sampai ini dijadikan perkara pidana yang didahulukan. Enggak boleh. Ini harus mediasi,” kata Supratman saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut dia, mediasi harus didahulukan jika terdapat polemik dalam pengelolaan royalti. Untuk itu, dia meminta komisioner LMKN untuk mengoordinasikan hal itu kepada para pihak yang berhubungan dengan tata kelola royalti.

“Saya minta kepada komisioner untuk berkomunikasi dengan asosiasi perhotelan, asosiasi pusat belanja, asosiasi restoran, atau apa pun namanya. Ajak mereka bicara, tentukan sikap,” kata Menkum.

Pada hakikatnya, imbuh dia, royalti dikelola secara bersama-sama. “Sebenarnya royalti itu dari kita, untuk kita, oleh kita,” katanya.

Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan oleh Razilu, direktur jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bersifat *administrative penal law* atau hukum pidana administrasi.

Dengan demikian, kata dia, pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh (*ultimum remedium*) dalam sengketa terkait hak cipta. Sementara itu, penyelesaian utamanya bisa dilakukan melalui jalur perdata, arbitrase, pengadilan niaga, atau mediasi.

“Tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika upaya perdata gagal *vide* (lihat) Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014,” kata Razilu dalam sidang lanjutan pengujian materi Undang-Undang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, tempo hari.

Menurut Razilu, ketentuan yang demikian menunjukkan bah-

wa sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat serta-merta diterapkan untuk setiap pelanggaran hak ekonomi.

“Dalam hal ini, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa harus dilakukan secara resmi dan oleh badan resmi yang diakui oleh pemerintah, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan juga badan lembaga lainnya yang juga diakui oleh pemerintah, serta dituangkan dalam berita acara mediasi di dalam pelaksanaannya,” papar dia.

Prinsip Keadilan

Di tempat terpisah, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat perlindungan hak cipta di bidang musik melalui perbaikan regulasi dan mekanisme pengelolaan royalti.

“Tentu kita sepakat bahwa pencipta, penyanyi, dan musisi harus menerima haknya, karena itu merupakan kekayaan intelektual. Namun, kita juga perlu memikirkan *fairness*, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaannya,” ujar Teuku Riefky.

Teuku Riefky menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta dengan melibatkan masukan publik.

Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan bahwa royalti yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dapat diaudit secara terbuka.

Di sisi lain, kebijakan juga harus mempertimbangkan pelaku usaha berskala mikro seperti warung kopi, penyanyi lokal di acara desa, hingga musisi panggung kecil yang turut mempromosikan karya musik.

Teuku Riefky menambahkan, pembahasan di DPR akan mengupas siapa saja yang dikenai kewajiban pembayaran royalti serta besaran yang berlaku, khususnya bagi usaha kecil.

“Jangan sampai kebijakan ini justru membebani pelaku usaha kecil yang juga berkontribusi pada promosi musik,” katanya.

Lebih lanjut Teuku Riefky mengungkapkan, pemerintah juga akan mengajak ekosistem industri musik, termasuk penyedia layanan *streaming* untuk berdialog.

Adapun tujuannya adalah menemukan model pengelolaan royalti yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun.

Ia berharap langkah ini dapat menciptakan sistem yang melindungi hak musisi sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif.

“Kita ingin semua pihak diuntungkan. Hak musisi terlindungi, dan para pengguna karya musik pun tetap bisa menjalankan usahanya dengan tenang,” kata Riefky.

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut bahwa beban royalti musik akan diberikan kepada pencipta karya, bukan sebagai pajak atau cukai yang dikumpulkan untuk negara.

“Seperti yang sudah disampaikan, royalti untuk pencipta, bukan lagi untuk negara. Jadi, kembali lagi kepada si pencipta karya itu sendiri,” tegas Widodo, direktur jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

Ia mengatakan kewajiban sektor pengusaha hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan untuk membayar royalti ini merupakan bagian bentuk menghormati dan menghargai seluruh karya-karya musik oleh penciptanya.

“Itu bagian dari menghormati hak kreativitas seseorang. Jadi, bila teman-teman menciptakan sesuatu, pastinya ingin dihargai,” kata dia.

Menkum Supratman mengakui

terdapat kelalaian dalam pengawasan tata kelola royalti. Namun, sebagai institusi yang memegang kendali, Supratman menekankan bahwa Kementerian Hukum siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Maka dari itu, dia meminta publik memberi waktu kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru dilantik pada Jumat (8/8) untuk menunjukkan kinerja.

Menurut dia, komisioner saat ini terdiri atas berbagai kalangan yang memahami royalti.

“Bahwa menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkan dan juga bagaimana mendistribusikan [royalti] itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” kata

Supratman.

Menkum pun menjamin transparansi dalam penetapan tarif royalti.

Dia mengaku tidak akan menandatangani besaran ataupun jenis tarif yang diusulkan LMKN jika hal itu tidak dilakukan secara transparan.

“Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya berikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban,” katanya.

Lebih lanjut Supratman mengatakan pengaturan terkait royalti akan didiskusikan dengan paman-gku kepentingan terkait untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (**ts/ant**)

Kurikulum Sekolah Rakyat Memadukan Aspek Akademik dan Keterampilan

CIREBON, ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebutkan, kurikulum Sekolah Rakyat memadukan pendidikan formal, pembinaan karakter, dan pelatihan keterampilan sesuai minat serta bakat siswa untuk memastikan pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

“Anak-anak yang punya potensi melanjutkan ke perguruan tinggi akan kita bina dan arahkan. Sementara yang ingin memperkuat keterampilan, kita fasilitasi juga,” kata Mensos di Cirebon, Rabu (13/8).

Ia menjelaskan pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, agar pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan aspek akademik, melainkan membekali siswa dengan kecakapan hidup yang dapat diterapkan di dunia kerja maupun wirausaha.

Menurut Mensos, kurikulum di Sekolah Rakyat disusun melalui dua jalur utama, yakni jalur pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum, dan jalur pendidikan karakter yang menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemandirian.

Selain itu, kata dia, tersedia pula kelas keterampilan yang meliputi berbagai bidang sesuai minat siswa, seperti kerajinan, pertanian, teknologi, maupun layanan jasa.

“Prinsipnya, mengikuti pilihan siswa. Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin langsung kerja. Semua kita siapkan jalurnya,” ujarnya.

Ia menuturkan sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan konsep *multi-entry* dan *multi-exit*, sehingga siswa dapat masuk atau keluar program sesuai kesiapan serta kondisi masing-masing.

Program ini, lanjut Mensos, juga bisa menjadi wadah bagi anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

Ia mencontohkan ada siswa di tingkat SMP atau SMA yang belum lancar

membaca, namun setelah dibimbing guru, dalam waktu satu bulan sudah menunjukkan kemajuan signifikan.

Saifullah memastikan pemerintah menyiapkan pengganti jika ada guru yang mengundurkan diri, untuk menjaga kualitas pembelajaran.

Ia menambahkan, Kemensos menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dapat menembus lebih dari 15 ribu orang hingga akhir 2025.

“Intinya kita ingin semua anak, dari berbagai latar belakang, punya kesempatan belajar dengan kurikulum yang sesuai bakatnya,” ucap dia.

Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang didesain untuk menjangkau anak dan juga anak penyandang disabilitas dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui integrasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan jaminan sosial secara menyeluruh termasuk kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program itu melaporkan jumlah siswa Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 9.700 orang yang mulai berjalan sejak Juli 2025. Jumlah ini didukung oleh lebih dari 1.500 guru serta sekitar 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.

Sekolah Rakyat tahap pertama ditargetkan ada di 159 lokasi di seluruh Indonesia yang mana sebanyak 63 titik telah aktif sejak pertengahan Juli, sedangkan 96 akan diluncurkan bertahap; sebanyak 37 di antaranya mulai beroperasi pertengahan Agustus dan 59 lainnya awal September 2025. (**ts**)



Persiapan Pidato Presiden di Kompleks Parlemen

Suasana gladi kotor persiapan pidato Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Gladi kotor ini sebagai rangkaian persiapan pidato Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar pada 15 Agustus 2025. Sejatinya, sidang tahunan ini dilaksanakan pada tiap 16 Agustus, namun karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka sesuai tata tertib DPR, sidang dimajukan sehari sebelumnya saat hari kerja.

8 Pintu Istana Kepresidenan Dibuka saat HUT RI

JAKARTA, ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebut ada delapan pintu masuk yang dibuka untuk peserta upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pras, begitu sapaan poplurnya, menyebutkan delapan pintu di sekitar Istana Kepresidenan RI itu dibuka untuk memudahkan ribuan peserta upacara

yang akan memasuki pelataran Istana Merdeka saat HUT Ke-80 Kemerdekaan RI pada hari Minggu, 17 Agustus 2025.

“Mungkin ada 8 pintu masuk. Kebetulan ya ini bukan dicocok-cocokkan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya meninjau gladi kotor ke-2 upacara HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Ketua Panitia HUT Ke-80 RI itu melanjutkan beberapa

pintu masuk itu, di antaranya dua pintu yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka, yang berseberangan langsung dengan Monumen Nasional.

“Ya semua *kan* dari arah Istana menghadap ke Monas, ke kanan-kiri, ini *kan* dicoba semua aksesnya baik untuk yang di pintu undangan sebelah kanan, untuk yang di pintu undangan sebelah kiri. Kemudian, para tamu undangan yang di pintu utama, pertama

itu ada beberapa pintu yang bisa masuk dari area belakang Istana Negara itu. Semua coba kita simulasikan,” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menyebut peserta upacara HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka mencapai 16.000 orang, yang kemudian dibagi dua, yaitu sebanyak 8.000 orang saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada hari Minggu, 17 Agustus pagi, dan sebanyak 8.000 orang

untuk

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus sore hari. Demi mengatur ribuan orang yang akan masuk pelataran Istana Merdeka, Prasetyo menyebutkan ada area-area yang telah diatur.

Berbagai persiapan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka telah digelar sejak minggu lalu, termasuk gladi kotor rangkaian acara upacara HUT RI yang pada hari ini memasuki kali kedua. Se-

banyak 76 calon anggota Paskibraka Nasional beserta pasukan gabungan petugas upacara yang terdiri atas prajurit TNI dan anggota Polri berlatih bersama-sama pasukan Satuan Musik (Satsik) dan seluruh penampil, termasuk atraksi *flypast* pesawat-pesawat TNI AU yang melintas di atas Istana Merdeka.

Prasetyo, selaku ketua panitia, mengikuti prosesi gladi di Istana Merdeka, sejak Selasa hingga hari Rabu (13/8/2025). **(is/ant)**



Panglima TNI Lepas Satgas Merah Putih II ke Gaza

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) melepas Satuan Tugas (Satgas) Merah Putih II untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pemerintah Indonesia mengirimkan sebanyak 66 personel Satgas Merah Putih II yang terdiri atas TNI, Kementerian dan Lembaga serta perwakilan media nasional untuk memberikan bantuan bahan makanan, obat-obatan, dan logistik lainnya sesuai kebutuhan seberat 800 ton dan 600 payung udara ke Gaza, Palestina.

Antara

BUPATI PATI TOLAK MUNDUR

Polisi Amankan 11 Orang terkait Demo Anarkis di Pati

PATI, ID - Polresta Pati, Jawa Tengah, bersama personel gabungan dari Polda Jateng dan polres jajaran berhasil melakukan pengamanan unjuk rasa anarkis di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). Polisi mengamankan 11 orang yang diduga provokator dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Oleh **Imam Suhartadi**

“**K**esebelas orang yang diduga provokator, sudah didata dan diperiksa oleh Satuan Reserse Polresta Pati untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Pati, Rabu (13/8/2025).

Ia mengungkapkan sejak awal kegiatan unjuk rasa yang digelar masyarakat di Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat berjalan dengan tertib dan lancar.

“Alhamdulillah dari awal kegiatan berlangsung dengan baik. Namun, menjelang siang hari, muncul kelompok lain yang bersifat anarkis sehingga merusak suasana damai tersebut,” ujarnya.

Kelompok tersebut, kata dia, melakukan pelemparan air mineral, batu, tongkat, buah busuk, dan berbagai benda lainnya. Sehingga memicu eskalasi hingga situasi menjadi *chaos*.

Petugas kepolisian sendiri sudah memberikan imbauan kepada massa agar menghentikan tindakan anarkis. Namun karena peringatan tidak diindahkan, polisi terpaksa melakukan pendorongan dan memecah massa untuk mengendalikan situasi.

“Sekitar pukul 15.00 WIB, situasi berhasil dikendalikan. Kami juga melakukan patroli

untuk memastikan Kota Pati dalam kondisi aman dan kondusif,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Artanto membantah informasi tentang adanya korban meninggal dunia dalam aksi menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo di depan Kantor Pemkab Pati.

Artanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. “Hasilnya tidak ada laporan korban meninggal dunia,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, terdapat 34 orang yang terluka dalam aksi yang berlangsung ricuh tersebut. “Ada 34 orang yang dirawat di RS Soewondo Pati,” tambahnya.

Menurut dia, para peserta aksi yang sebagian besar mengalami sesak nafas karena menghirup gas air mata itu sudah diizinkan pulang.

Selain peserta aksi, lanjut dia, tujuh polisi juga dilaporkan terluka dalam aksi tersebut. “Ada sekitar tujuh polisi, kemungkinan juga bisa bertambah,” katanya.

Diketahui, peristiwa unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo yang awalnya berlangsung tertib, berubah menjadi keriuhan hingga mengakibatkan aksi anarkis perusakan pagar, pembakaran mobil hingga perusakan kaca perkantoran bupati, Rabu (13/8/2025).

Keriuhan diperkirakan terjadi pukul 11.30 WIB,

setelah sebelumnya terjadi pelemparan air mineral ke arah petugas hingga benda-benda lainnya yang bisa membahayakan keselamatan.

Tolak Mengundurkan Diri

Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati, Rabu (13/8/2025).

Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan. “DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini (13/8/2025) sebagian besar sudah selesai dan situasi kembali kondusif.

“Secara garis besar sudah selesai. Kalaupun saat menemui pendemo terjadi ada pelemparan kami bisa memahami emosi mereka karena jumlah massa banyak sehingga tidak mungkin terkendali sepenuhnya. Tapi yang terpenting, semuanya sudah berjalan baik,” ujarnya.

Ia mengakui kejadian tersebut menjadi pros-

es pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat. “Tentu ada kekurangan yang harus dibe-nahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti penanganan massa aksi yang mengalami masalah kesehatan.

Ia meminta pihak rumah sakit memberikan perawatan terbaik, agar mereka yang sakit segera membaik dan sehat kembali.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan hari ini (13/8/2025) memang digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri 42 orang dari 50 anggota, sehingga kuorum.

Kemudian, kata dia, dari 42 anggota itu ada yang mengusulkan terbentuknya panitia khusus (Pansus) angket. Sehingga rapat tersebut juga membentuk tim pansus angket dengan jumlah anggota 15 orang.

“Semua fraksi menyepakati dibentuk tim pansus angket untuk menindak-lanjuti tentang kebijakan Bupati Pati Sudewo. Hari ini (13/8/2025) pansus langsung rapat. Sedangkan hasilnya menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, dari tim pansus DPRD Pati itu akan mengevaluasi kebijakan Bupati Pati terkait penanganan pengunjuk rasa, kemudian hasilnya baru direkomendasikan untuk dikirim ke Mahkamah Agung.

Terima Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran *commitment fee* (biaya komitmen, red.) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR RI tersebut sebagai saksi kasus tersebut.

“Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023. **(is/ant)**

Wapres Gibran Silaturahmi ke Kediaman Try Sutrisno

JAKARTA, ID - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Selain silaturahmi, dalam kunjungan itu, Gibran turut menyampaikan undangan Peringatan HUT RI ke-80 kepada Try Sutrisno, yang diterima dengan penuh perhatian.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya.

Hal itu termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional.

Dalam suasana pertemuan yang hangat dan penuh rasa hormat, Wapres disambut langsung oleh Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini Nora Tristiyana Try Sutrisno.

Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.

Pada kesempatan ini, Try Sutrisno juga memberikan wejangan berharga terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Try Sutrisno sendiri tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional.

Kehadiran Wapres Gibran di kediaman Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

Tak Miliki Masalah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan dirinya tak memiliki permasalahan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Nggak, nggak ada masalah itu. Sama sekali nggak ada,” kata AHY usai menghadiri forum diskusi dengan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dia memastikan bahwa hubungannya dengan Wakil Presiden sangat baik, karena isu terkait permasalahan dengan dirinya itu tidak benar. “Baik sekali, nggak ada masalah,” kata dia.

Sebelumnya beredar narasi di media sosial bahwa Wapres Gibran tak menyalamahi AHY saat menghadiri upacara gelar operasional dan kehormatan TNI di Landasan Udara Suparlan Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD di Batuujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Namun setelah narasi itu beredar, baik Gibran maupun AHY sama-sama mengunggah video di akun media sosialnya yang berisi momen kebersamaan mereka berdua ketika menghadiri acara tersebut. **(is/ant)**

Orang dengan Otot Jantung Tebal Berisiko Menderita Aritmia

JAKARTA, ID – Orang yang memiliki otot jantung tebal dari lahir memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit gangguan irama jantung atau disebut juga aritmia. Risiko ini semakin tinggi bila ia melakukan aktifitas berat, seperti menjadi atlet.

“Denyut jantung normal itu antara 60 sampe 100 denyut per menit. Ketika ada sensasi yang tak biasa, misal denyut terlalu cepat atau terlalu lambat, itu harus dideteksi, jangan-jangan menderita gangguan irama jantung. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung dan penggumpalan darah yang mengakibatkan stroke,” kata ahli aritmia dari RS Heartology, dr Sunu Budhi Raharjo, SpJP(K), PhD di sela CARES 2025 (Cardiac & Vascular Excellence Scientific Update) di Jakarta, baru-baru ini.



Ahli aritmia dari RS Heartology, dr Sunu Budhi Raharjo, SpJP(K), PhD menjelaskan gangguan irama jantung (aritmia) bisa dipicu otot jantung tebal.

Seseorang dikatakan menderita gangguan irama jantung, bila jantung berdenyut lebih cepat atau lebih lambat. “Lebih cepat itu kalau jantung berdenyut antara 150-200 denyut per menit, sedangkan denyut lebih lambat bila di bawah 60 denyut per menit,” terang dr Sunu.

Namun, lanjut dr Sunu, denyut jantung lebih cepat dari normal tidak serta merta langsung disebut gangguan irama jantung. “Kalau kondisi lagi panik, kita melakukan aktifitas, denyut meningkat, itu mekanisme normal. Yang masalah ketika tidak ada peningkatan aktvitas, sedang duduk-duduk, tapi tiba-tiba denyut naik sendiri, itu harus diwaspadai sebagai gangguan irama jantung,” tegas dr Sunu.

Namun, pada kasus pemain bulutangkis Cina yang sedang bertanding di Yogyakarta tiba tiba jatuh, lalu meninggal, dr Sunu menduga denyut jantungnya sangat cepat karena ada gangguan jantung yang dipicu kelainan otot jantung yang menebal. “Itu biasanya dipicu dia punya otot jantung yang besar, itu bakat dari lahir,” jelas dr Sunu.

Penjelasannya, seseorang dengan bakat otot jantung tebal, ketika menjad atlet, otot jantungnya semakin menjadi tebal karena sering berlatih keras. “Otot jantung tebal ini memicu terjadi konsleting listrik di jantung, sehingga denyut jantung menjadi sangat cepat dan penderitanya akan kolaps, pingsang, lalu meninggal,” terang dr Sunu.

Jadi, simplenya, kalau kita beraktifitas, denyut jantung meningkat itu wajar. “Tapi sedang tiduran, duduk, tiba dug dug dug, itu gak normal. Atau denyut melemah, membuat darah tidak terpompa sehingga jantung kekurangan oksigen. Itu bedanya dengan penyakit jantung koroner (PJK. Kalau PJK, terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga darah tidak bisa terpompa, jantung tidak mendapat oksigen dan orangnya kolaps,” jelas dr Sunu.

Saat ini, kata dr Sunu, jumlah penderita aritmia di Indonesia cukup tinggi dibandingkan di negara lain. “Kalau dibandingkan dengan Malaysia, jumlah penderita aritmia di Indonesia lebih banyak 10 kali lipat dibanding Malaysia,” ungkap dr Sunu.

Mirisnya, jumlah dokter ahli aritmia di Indonesia sangat minim. “Indonesia hanya punya 56 dokter ahli aritmia. Yang jadi masalah coverage nya tak tersebar. Di Kalimantan hanya satu, Sulawesi satu, Sumatera dan Jawa lebih banyak. Karena itu dibutuhkan fellowship untuk menambah jumlah dokter ahli aritmia,” harap dr Sunu.

Tindakan penanganan

Tatalaksana aritmia meliputi terapi obat-obatan (medikamentosa), kontrol faktor risiko, dan kateter ablas. Pasien yang tidak mempan dengan obat-obatan, perlu dilakukan tindakan kateter ablas untuk mencegah memburuknya fungsi pompa jantung (gagal jantung), menurunkan risiko stroke dan memperpanjang usia pasien.

Saat ini, adapengobatan terbaru, yaitu teknologi PFA (Pulsed Field Ablation). “Heartology Cardiovascular Hospital menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Pulsed Field Ablation (PFA) dalam tatalaksana fibrilasi atrium atau aritmia. Sebagai rumah sakit yang berfokus pada tatalaksana kardiovaskular, kami selalu mengedepankan inovasi demi menempatkan kenyamanan dan keamanan pasien sebagai prioritas utama,” kata Direktur Heartology Cardiovascular Hospital.dr Faris. Dr dr Faris Basalamah, SpJP(K).

Dr Sunu menjelaskan, PFA merupakan salah satu kategori kateter ablas (tindakan invasif minimal non-bedah) non-thermal yang bekerja melalui proses electroporation. “Proses ini melakukan pengiriman gelombang listrik pendek yang membuka pori-pori membran sel sehingga jaringan yang ditargetkan dapat dihancurkan dengan aman tanpa mempengaruhi jaringan lainnya,” jelas dr Sunu. **(nan)**

Punya Jingle Sendiri Hippindo Minta Tarif Royalti LMKN Direvisi

JAKARTA, ID - Polemik antara pelaku usaha dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terus memanas. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah keberatan terkait kewajiban membayar royalti lagu, meski hak cipta lagu yang diputar miliki sendiri.

Budiharjo Iduansjah mengatakan, sejumlah pelaku usaha memiliki jingle atau lagu yang khusus dibuat untuk branding usahanya. Biaya produksi lagu, penyanyi, dan hak cipta telah dibayar lunas dan dimiliki sepenuhnya. Namun, LMKN tetap mewajibkan pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Kami punya jingle, kami sudah bayar semuanya. Hak cipta ada di kami. Namun, itu juga disuruh bayar. Kami kurang setuju,” ujar Budiharjo Iduansjah kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Ia menegaskan pihaknya tidak menolak membayar royalti, tetapi menilai tarif yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang diminta pelaku usaha.

“Tahun lalu kami sudah kirim surat ke LMKN, mau bayar. Namun, angka yang kami tawar ditolak. Padahal itu itikad baik,” tambahnya.

Tarif royalti yang diberlakukan LMKN disebut berkisar Rp 60.000 hingga Rp 150.000 per kursi, tergantung jenis usaha, seperti kafe atau restoran.

Akibat kebuntuan dalam negosiasi, Budiharjo Iduansjah menginstruksikan kepada sekitar 800



Ilustrasi royalti lagu.

anggota ritel yang mengelola lebih dari 80.000 toko di pusat perbelanjaan untuk tidak memutar musik di tempat usaha mereka hingga ada kejelasan.

LMKN menegaskan, pemungutan royalti adalah bentuk penegakan Undang-Undang Hak Cipta. Dana royalti akan disalurkan kepada pencipta lagu

dan musisi, dengan 20% dialokasikan untuk operasional lembaga.

Namun, kekhawatiran pelaku usaha tetap muncul, khususnya terhadap kemungkinan pelanggaran atau denda karena memutar musik tanpa izin di tempat publik. **(b1)**

Erick Thohir Puji Laga Perdana Timnas U-17 Lancar

JAKARTA, ID - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji lancarnya pertandingan perdana Timnas Indonesia U-17 vs Tajikistan pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara.

Oleh **Mardiana Makmun**

Pertandingan berjalan lancar meski lapangan diguyur hujan deras dari awal pertandingan. Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Sumut menggelar event sepak bola internasional. “Saya rasa semua senang, kita akan coba dorong lebih banyak pertandingan timnas di Sumut,” kata Erick Thohir di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Selasa (12/8/2025) malam.

Erick Thohir juga memuji Stadion Utama Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari tiga stadion khusus sepak bola yang ada di Indonesia. Dia berharap fasilitas ini bisa dijaga dan terus dikembangkan.

“Saya rasa di Indonesia cuma ada tiga stadion yang benar-benar untuk sepakbola, Sumatera Utara, Balikpapan, dan JIS Jakarta. Saya rasa fasilitas seperti ini hal yang positif dan harus kita jaga,” kata Erick Thohir.

Ada lebih dari 12.000 suporter yang menon-



ton laga ini langsung dari Stadion Utara Sumatera Utara, membuat atmosfer laga ini semakin hidup. Ditambah lagi, desain stadion yang membuat penonton dekat dengan pemain sehingga bisa merayakan gol bersama-sama.

“Luar biasa 12.000 penonton untuk pertandingan U-17 dan memang kebetulan para peserta yang hadir tim yang terkualifikasi di Piala Dunia U-17. Ini saya rasa pertandingan yang dibutuhkan tim U-17 kita, tetapi juga secara tontonan sangat layak,” kata Thohir.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution bersyukur masyarakat Sumut bisa menyaksikan secara langsung Timnas U-17 beraksi di lapangan. Dia memastikan pihaknya akan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan event sepak bola internasional dan siap untuk event berikutnya.

“Ini menjadi pelajaran tentunya bagi kami, juga bagi pemain di lapangan, panitia lokal, penonton ini menjadi pembelajaran semua, dan kami siap untuk event-event sepak bola selanjutnya,” kata Bobby Nasution.

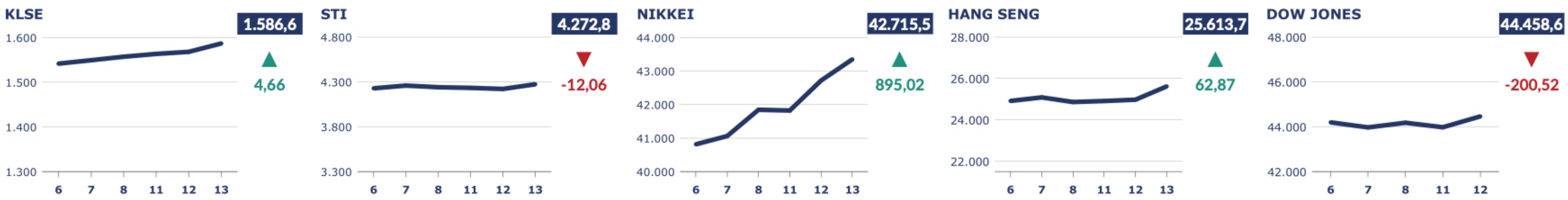
Setelah bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan, Timnas U-17 akan melawan Uzbekistan pada Jumat (15/8/2025) pukul 19.30 WIB, kemudian di hari terakhir, Senin (18/8/2025) akan melawan Mali pukul 20.30 WIB. **(b1)**



Investor Daily/David Gita Roza

Kampanye Keberlanjutan OCBC

Komisaris Independen OCBC Betti Alisjahbana (tengah) berbincang dengan Head of Programmes UN Woman Indonesia Dwi Yuliatwati (kiri) dan Koordinator Aliansi Laki Laki Baru (ALB) Wawan Suwandi, saat diskusi di Jakarta, Rabu (13/8/2025). Acara ini merupakan bagian dari kampanye keberlanjutan OCBC #Bai-knyaBarengBareng 2025 yang terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih setara dan inklusif bagi semua.



Penjualan Mobil Membaik, Prospek Saham ASII Cerah

JAKARTA, ID – PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan kenaikan penjualan mobil sebanyak 31.722 unit pada bulan Juli 2025, tumbuh 8,52% dibanding bulan Juni 2025 (*month to month/mtm*). Kenaikan ini melampaui pertumbuhan penjualan mobil nasional yang ssebanyak 5% menjadi 60.552 unit, sehingga pangsa pasar Astra tetap kokoh di kisaran 54%. Kenaikan ini menegaskan posisi dominan Astra di industri otomotif, sekaligus memberi sinyal positif bagi prospek sahamnya hingga akhir tahun.

Head of Corporate Communications Astra International Windy Riswantyo mengatakan, pertumbuhan tersebut tidak lepas dari berbagai faktor penopang ekonomi. “Kami melihat sejumlah faktor positif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi pasar otomotif nasional pada semester II-2025, antara lain penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% serta potensi peningkatan belanja pemerintah. Kombinasi faktor ini diharapkan dapat memperkuat daya beli konsumen dan mendukung pertumbuhan pasar otomotif. Hingga Juli 2025, Astra mencatatkan pangsa pasar sebesar 54% dan konsisten menghadirkan beragam pilihan kendaraan di berbagai segmen, didukung jaringan penjualan dan layanan purnajual yang terintegrasi di seluruh Indonesia,” ujar Windy dalam keterangan resminya, baru-baru ini.

Analis Indo Premier Sekuritas Aurelia Barus dan Halima Yefany mencatat bahwa volume wholesales roda empat (4W) nasional pada Juli 2025 mencapai 60,55 ribu unit, naik 5% secara bulanan, dengan kontribusi Astra sebesar 31,87 ribu unit atau naik 8,52% dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini sebagian didorong oleh ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang dibuka pada 24 Juli 2025.

Meski demikian, volume wholesales Juli 2025 masih di bawah rata-rata historis tahunan, dan penjualan kendaraan listrik (xEV) turun 10% secara bulanan. Indo Premier memperkirakan, tren ini hanya sementara, dan penjualan xEV akan pulih dalam beberapa bulan mendatang.

GIIAS 2025 dilaporkan menarik lebih banyak pengunjung dibandingkan tahun lalu, meski total transaksi diperkirakan pada kisaran Rp18 triliun atau di bawah target Rp20 triliun. Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Toyota tercatat 4.200 unit, Daihatsu 580 unit, Wuling 2.400 unit, sementara BYD dilaporkan melampaui 7.000 unit. Dari sisi pembiayaan, Astra Finansial mencatatkan transaksi Rp2,4 triliun, melampaui target internal Rp2,2 triliun.

Prospek Cerah

Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai, capaian penjualan Astra yang melampaui pertumbuhan industri menjadi sinyal positif bagi investor. “*Market share* yang stabil di 52%–54% menunjukkan posisi ASII masih solid. Meski industri otomotif tahun ini tertekan daya beli yang lemah, prospek pemulihan di 2026 terbuka lebar seiring potensi penurunan suku bunga lebih lanjut, pemulihan ekonomi, dan peluncuran model baru,” ujar dia.

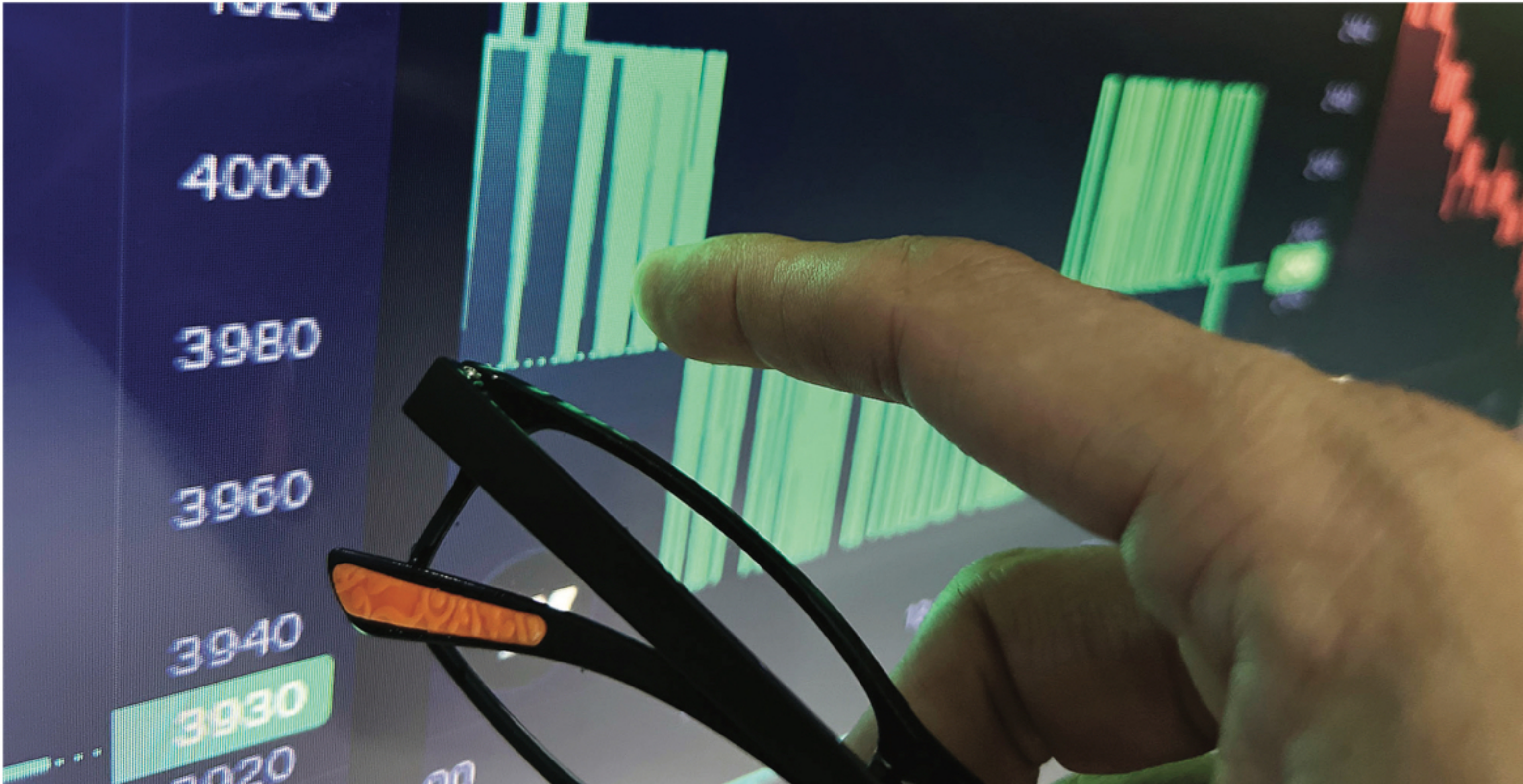
Korea Investment & Sekuritas Indonesia mempertahankan rekomendasi *buy* untuk ASII dengan target harga Rp5.500 per saham.

Sementara itu, praktisi pasar modal dan pendiri Republik Investor Hendra Wardana menilai, tren kenaikan penjualan bulanan menjadi momentum awal pemulihan bagi Astra. “Turunnya BI rate ke 5,25% akan meringankan cicilan kredit kendaraan dan memicu peningkatan minat beli, apalagi didukung rencana belanja pemerintah menjelang akhir tahun,” ujar dia.

Dari sisi fundamental, laba bersih semester I-2025 turun tipis 2,15% secara tahunan menjadi Rp 15,51 triliun, namun kuartal II-2025 mencatat lonjakan laba 27,7% secara kuartalan dengan pendapatan naik 11,9%. Valuasi saham ASII dinilai murah dengan PER 6,5 kali dan PBV 0,9 kali, lebih rendah dibanding rata-rata sektor otomotif di kisaran PER 9,5 kali dan PBV 2 kali.

Secara teknikal, saham ASII menarik untuk diakumulasi dengan target jangka pendek di Rp5.175–5.300 dan target jangka menengah Rp5.500–5.700 jika tren pemulihan berlanjut. “Dengan kombinasi momentum kebijakan moneter longgar, prospek penjualan yang membaik, dan valuasi yang atraktif, ASII dinilai layak menjadi salah satu saham unggulan di sisa tahun ini,” ujar Hendra.

Pada perdagangan Rabu (13/8/2025), saham ASII berakhir di zona hijau di harga 5.175 setelah mengalami penguatan sebanyak 185 poin (3,71%). **(fur)**



Investor Daily/David Gita Roza

IHSG Menguat

Investor melihat pergerakan saham melalui monitor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak ke level 7.892,91 pada Rabu (13/8/2025). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat sebesar 1,30% atau 101,21 poin menuju posisi 7.892,91.

KADO MANIS JELANG HUT RI KE-80

IHSG Tembus 8.000 di Depan Mata

JAKARTA, ID – Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menuju level psikologis 8.000 makin di depan mata. Rekor tertinggi ini bisa menjadi kado manis menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-80. Terlebih, kombinasi sentimen baik domestik maupun global mendukung.

Oleh **M. Ghafur Fadillah**

Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan, Rabu (13/8/2025), kapitalisasi pasar BEI kembali mengukir sejarah baru dengan mencatat kenaikan sebesar Rp 190 miliar menjadi Rp 14,203 triliun daripada *market cap* pada hari perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp 14,013 triliun. Masuknya dana asing ke pasar saham juga masih mengalir deras dengan mencatatkan nilai beli bersih (*net buy*) sebesar Rp 1,48 triliun. Melanjutkan tren guyuran asing pada dua hari sebelumnya yang mencapai Rp 3,05 triliun.

Saham TLKM menjadi primadona asing pada perdagangan Rabu (13/8/2025) dengan mencetak nilai transaksi mencapai Rp Rp 722 miliar. Disusul, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan *net buy* senilai Rp 405,7 miliar. Kemudian, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Astra International Tbk (ASII) dengan *net buy* masing-masing sebesar Rp 276,1 miliar dan Rp 199 miliar.

Tak ketinggalan, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) milik Prajogo Pangestu masuk sasaran asing dengan *net buy* mencapai Rp 100,69 miliar. Sebaliknya, *net sell* terbanyak oleh investor asing menimpa saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencapai Rp 193,1 miliar. Diikuti, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan *net sell* sebesar Rp 89,7 miliar.

Paralel dengan *net buy* asing yang masih cukup tinggi hingga hari perdagangan ketiga sepekan ini, telah membuat transaksi *net sell* asing terus berkurang sepanjang tahun berjalan menjadi Rp 57,3 triliun. Alhasil, performa IHSG pun melanjutkan penguatan sebanyak 101,21 poin atau 1,3% hingga mampu berakhir di posisi 7.892,91. Dari sisi perdagangan, sebanyak 346 saham menguat, 280 saham melemah, dan 173 saham stagnan. Nilai transaksi harian mencapai Rp 20,81 triliun

dengan volume 36,5 miliar saham dan frekuensi 2.193.726 kali.

Kenaikan IHSG kali ini juga tidak lepas dari menguatnya kinerja mayoritas sektor. Di mana, sektor teknologi memimpin reli dengan lonjakan 3,98%, diikuti sektor kesehatan (1,56%), properti (1,49%), infrastruktur (1,46%), dan barang konsumsi siklikal (1,12%). Pelemahan terjadi di sektor transportasi (-0,68%) dan barang konsumsi non-siklikal (-0,12%).

Rekomendasi Saham

VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, menyampaikan bahwa pasar merespons positif perpanjangan gencatan tarif antara AS dan China selama 90 hari ke depan. “Kami merevisi target konservatif IHSG hingga akhir 2025 di kisaran 8.000–8.100,” ujar Audi kepada *Investor Daily*, Rabu (13/8/2025). Bahkan, dikatakan Audi, sektor keuangan khususnya perbankan akan menjadi motor penggerak indeks berikutnya seiring dengan *outlook* ekonomi yang lebih positif. Saham-saham pilihannya adalah BMRI dengan target harga Rp 6.300, lalu BBRI dengan target harga Rp4.360, dan TLKM dengan target harga Rp 3.240.

Pendiri Republik Investor, Hendra Wardana, juga menatap optimistis bahwa target IHSG menuju 8.000 dapat tercapai bahkan sebelum perayaan HUT RI ke-80. Mengingat, posisi IHSG saat ini sudah sangat dekat. Ditambah, sentimen pasar sedang optimistis, arus modal asing masuk besar, dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September menjadi katalis utama.

Lebih dari itu, Hendra menyoroti, potensi dukungan tambahan dari kesepakatan tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia juga berpotensi meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Hanya saja, dirinya mengingatkan, agar para investor tetap mewaspadai adanya hambatan

teknikal di *resistance* historis 7.911. “Jika tertahan di level ini, IHSG rawan aksi ambil untung dalam jangka pendek. Risiko lain berasal dari nilai tukar rupiah yang masih di kisaran Rp16.190 per dolar AS, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan pelonggaran moneter global,” beber dia.

Untuk itu, Hendra merekomendasikan sejumlah saham potensial seperti BBRI dengan target harga Rp 4.230. Saham BBRI dinilai menjadi favorit investor asing dan memiliki fundamental yang kuat. Selain BBRI, Hendra juga menjagokan saham emiten terafiliasi Boy Thohir yaitu ADRO dengan target harga Rp 2.000 karena memiliki sentimen positif dari potensi kenaikan harga batu bara. Berikutnya, saham BRMS dengan target harga Rp 470 yang dipandang mempunyai prospek menjanjikan dengan potensi kenaikan dari harga logam mulia. Terakhir, saham MAPA dengan target harga Rp 745. Saham MAPA dinilai akan memperoleh keuntungan pulihnya konsumsi domestik selepas penurunan suku bunga.

“Dengan kombinasi sentimen global yang kondusif, arus modal asing yang deras, dan penguatan sektor unggulan, peluang IHSG untuk mencetak sejarah di level 8.000 kian besar. Jika *resistance* 7.911 dapat ditembus dalam waktu dekat, indeks berpotensi melesat menuju kisaran 8.174–8.354, menjadikan BEI salah satu bursa terbaik di dunia pada 2025,” tutur Hendra.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, juga berpendapat, peluang IHSG untuk menembus level 8.000 terbuka lebar tentunya dengan dorongan katalis tambahan. “Momentum ini bisa terwujud asalkan sejumlah faktor global dan domestik mendukung seperti kesepakatan damai Ukraina, perbaikan hubungan dagang AS–Tiongkok, serta penurunan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia pada akhir tahun,” ujarnya kepada *Investor Daily*, Rabu (13/8/2025).

Rekomendasi Saham Pilihan

Kode Emiten	Target Harga	
	Kiwoom Sekuritas	Republik Investor
BMRI	6.300	-
BBRI	4.360	4.230
TLKM	3.420	-
ADRO	-	2.000
BRMS	-	470
MAPA	-	745

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

Indeks Harga Saham Gabungan



Komoditas Jadi Tumpuan Ekspor

> Sambungan dari hal 1

Sementara itu, dia menuturkan, harga nikel masih tertekan kondisi *oversupply* dunia. Permintaan dari luar negeri turun, karena adanya kompetisi teknologi baterai *lithium ferro phosphate* (LFP) non-nikel dan *nickel manganese cobalt* (NMC) yang mengandung nikel.

Dari sisi hilir, dia menuturkan, pasar *stainless steel*, produk manufaktur penyerap nikel terbesar, juga tertekan kebijakan bea masuk antidumping China sebesar 20,2% sejak 1 Juli 2025.

Dia menambahkan, harga batu bara tengah meningkat, seiring lonjakan permintaan listrik pada musim panas dan naiknya kebutuhan di AS dan Eropa. Namun, kenaikan harga batu bara masih dibayangi pasokan yang berlimpah di Tiongkok.

Ke depan, dia menuturkan, ekspor Indonesia masih dapat terdorong oleh ekspor ke UE seiring perjanjian dagang IEU-CEPA yang cukup menguntungkan bagi sektor padat karya Indonesia.

Dia menambahkan, intervensi pemerintah diperlukan ke sektor padat karya yang terekspos langsung pada pasar AS. Selain itu, diversifikasi pasar di luar AS dan diversifikasi produk juga diperlukan. "Pada titik ini, daya saing perlu diperkuat dengan sertifikasi dan standarisasi produk sesuai regulasi negara tujuan," tegas David di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, ekspor komoditas masih menjadi andalan Indonesia. Namun, alangkah baiknya jika komoditas ini diolah lebih dahulu agar nilai tambah meningkat dan membuka lapangan kerja.

"Kita fokus ke beberapa komoditas saja, seperti nikel, bauksit, CPO, tembaga, dan kopi, dengan membentuk ekosistem solid. Jika sudah sukses, bisa dikopi ke komoditas lain," tegas dia.

Optimisme Pengusaha

Pada bagian lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono optimistis minyak sawit masih menjadi tumpuan ekspor nonmigas pada paruh kedua tahun ini. Selama ini, minyak sawit memang selalu menjadi andalan ekspor dan penyelamat neraca perdagangan.

"Minyak sawit masih menjadi tumpuan ekspor nonmigas di semester kedua tahun ini, seiring turunnya tarif resiprok AS dan IEU-CEPA menjadi sentimen positif. Hanya saja, itu tidak otomatis akan menaikkan volume ekspor, sebab masih ada minyak nabati lain, ini juga sebagai komponen yang mempengaruhi ekspor," kata dia kepada *Investor Daily*.

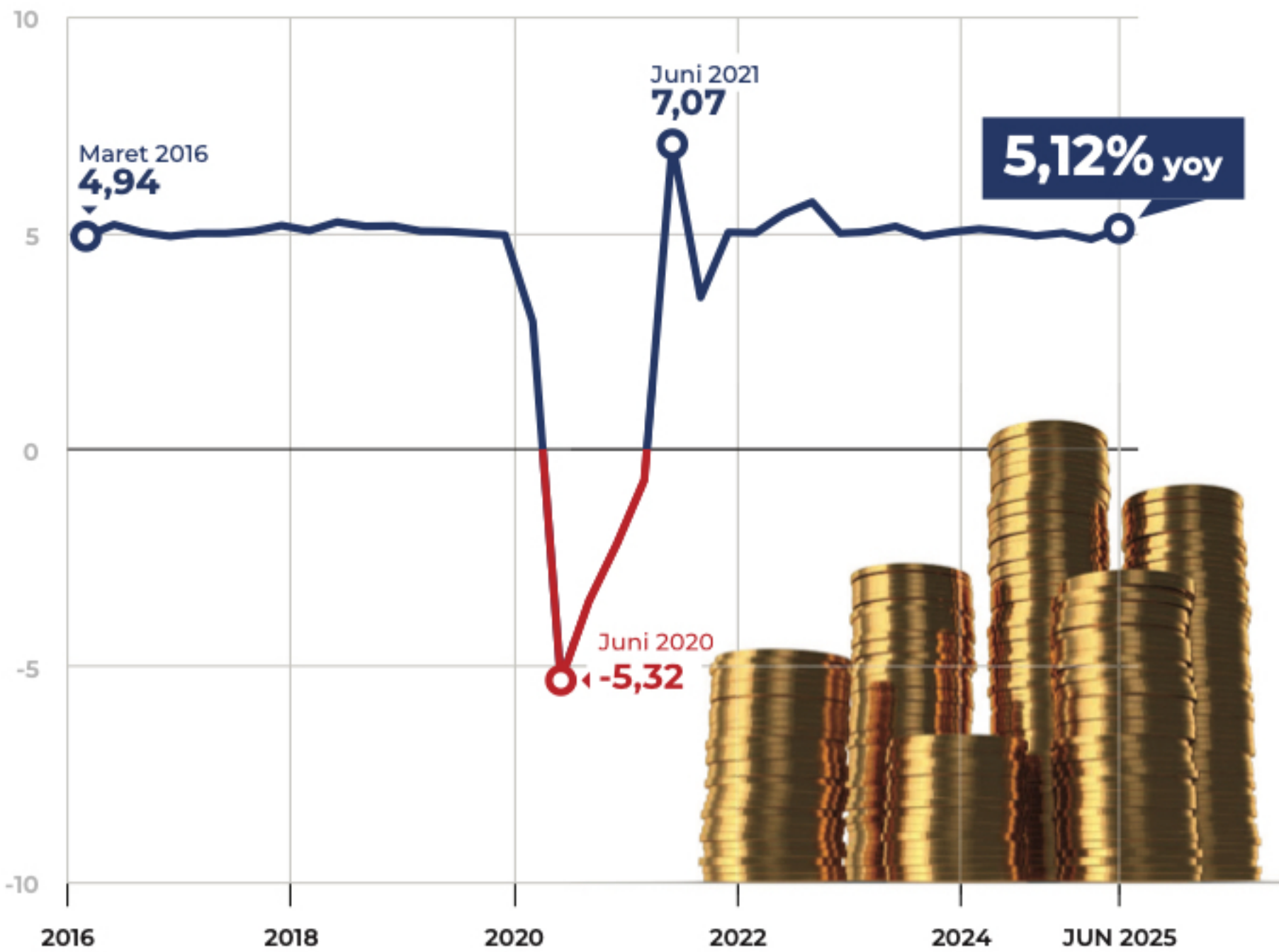
Menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung, harga CPO di pasar internasional saat ini sudah di atas US\$ 1.000 per ton dan rerata sepanjang Januari-Agustus sudah mendekati US\$ 1.000 per ton atau jauh lebih baik dari 2024.

"Sampai akhir tahun, harga CPO di pasar global dalam tren naik, mungkin di kisaran US\$ 1.100-1.200 per ton," tutur dia saat dihubungi *Investor Daily*, di hari yang sama.

Tungkot mengatakan, kenaikan harga akan sangat menolong capaian performa ekspor komoditas tersebut pada paruh kedua tahun ini. Penurunan tarif Trump serta kesepakatan IEU-CEPA menjadi sentimen

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sedekade

Perkembangan PDB RI, 2016-2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Juni 2025 mencapai 5,12% yoy. Dalam sedekade, laju PDB RI masih bertumbuh 3,64%.



SUMBER: BPS

Tren Harga Komoditas Sepanjang 2025

Perkembangan harga berbagai komoditas, Januari-Agustus 2025. Sepanjang 2025, harga nikel terkoreksi 1,73% pada penutupan 12 Agustus 2025. Di sisi lain, harga CPO justru tumbuh 5,99%, bahkan harga batu bara melesat 11,55% pada periode yang sama.



SUMBER: INVESTING

paling positif bagi ekspor CPO dan produk turunannya ke depan.

Dia menegaskan, produksi minyak sawit Indonesia tidak sejelek yang diperkirakan. Ini sejalan dengan kinerja ekspor. Apalagi, Eropa sudah membuka pasar CPO Indonesia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho optimistis, ekspor batubara membaik pada semester II-2025. Hingga akhir 2025, ICI 4 diharapkan dapat naik sekitar 10-20% dari harga awal Agustus.

"Dengan asumsi kondisi pasar global

tidak mengalami perubahan drastis dan tren kenaikan harga terus berlanjut, kami memproyeksikan volume ekspor batu bara kembali meningkat," tegas dia.

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menegaskan, hingga Juli 2025, ekspor batu bara Indonesia ke China mencapai 102,1 juta ton, atau sekitar 50% dari total permintaan batubara termal China sebesar 204,51 juta ton. Meskipun masih menjadi pasar terbesar, permintaan tahun ini tidak setinggi 2024 karena China menggenjot produksi tambang domestiknya untuk mengurangi ketergantungan impor.

Adapun selama Januari-Juni 2025, dia melanjutkan, Indonesia mengekspor 56,54 juta ton batu bara ke India, memenuhi sekitar 63% dari total permintaan mereka sebesar 89,14 juta ton.

Dia menyatakan, permintaan batu bara dari China dan India pada semester II 2025 masih akan menopang ekspor Indonesia, walaupun pertumbuhannya tidak setinggi tahun lalu. Tetapi, peningkatan produksi domestik di kedua negara ini menjadi faktor pembatas, sedangkan pasar Asean memberi tambahan peluang di tengah perlambatan global.

"Artinya, target produksi batu bara tahun ini sebanyak 739 juta ton dapat tercapai, kendati masih ada banyak tantangan yang dihadapi industri," tegas dia.

Prospek Ekspor ke AS

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal memprediksi ekspor ke AS turun setelah tarif resiprokal berlaku. Ini akan mengikis surplus neraca perdagangan.

"Artinya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kondisi seperti sekarang memang, menguatkan kerja sama dengan negara-negara di luar tradisional dan juga memperkuat ekonomi dalam negeri," kata dia.

Dia menyebut beberapa pasar ekspor potensial, seperti Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tengah, Asia Timur, dan Eropa Timur. Pada saat yang sama, ekspor manufaktur perlu didorong ketimbang komoditas, karena yang punya nilai tambah tinggi.

Data BPS yang diolah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US\$ 26,5 miliar tahun 2024 dibandingkan 2023 sebesar US\$ 23,2 miliar. Adapun impor asal AS naik menjadi US\$ 12 miliar dari US\$ 11,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US\$ 14 miliar.

Per Juni 2025, surplus neraca perdagangan mencapai US\$ 19,48 miliar, naik US\$ 3,9 miliar dari periode sama tahun lalu US\$ 15,5 miliar. Pada periode itu, AS menjadi penyumbang surplus terbesar, mencapai US\$ 8,5 miliar, diikuti India US\$ 6,5 miliar, dan Filipina US\$ 4,4 miliar.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan, ekspor ke AS memang berpotensi turun dalam 1-2 bulan ke depan karena faktor *adjustment*. Tetapi, selepas itu, ada potensi ekspor ke Paman Sam meningkat, karena tarif resiprok AS lebih rendah dari saingan utama, seperti China, Vietnam dan India.

Ke depan, dia menegaskan, perlu peningkatan daya saing dan diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan ekspor komoditas. Kuncinya adalah perbaikan iklim investasi dan berusaha.

Selama ini, dia menilai, arus investasi asing langsung (*foreign direct investment/ FDI*) sektor manufaktur dan teknologi tidak masuk Indonesia, karena iklim yang tidak kondusif. Padahal, FDI merupakan batu loncatan penting bagi transfer teknologi dan terhubungnya Indonesia dengan rantai pasok global (*global supply chain*).

"Karpas merah juga perlu diberikan kepada pengusaha yang selama ini sudah beroperasi di Indonesia, khususnya sektor manufaktur. Mereka juga perlu difasilitasi dan didorong untuk terus meningkatkan investasi," kata dia. **(ac)**

Tahun 2026, Anggaran MBG Capai Rp300 Triliun

> Sambungan dari hal 1

"Alhamdulillah penyerapannya sudah mencapai Rp 7,9 triliun padahal kemarin kami perkirakan sampai akhir Juli hanya Rp 6 triliun. Dengan penambahan (anggaran) yang signifikan penyerapan akan sangat signifikan di bulan Agustus dan September," ucap Dadan.

Pada awal tahun pemerintah menargetkan anggaran MBG senilai Rp 71 triliun dengan target awal 17,9 juta orang yang terbagi dalam 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui/balita. Namun pada akhir tahun 2025 penyaluran MBG ditargetkan untuk 82,9 juta penerima.

"Kami perkirakan nanti khusus di bulan Agustus ini akan terserap Rp 3 triliun sehingga kumulatif akan Rp 9 triliun. Kemudian pada September kita sudah bisa melayani kurang lebih 50 juta penerima manfaat sehingga akan menyerap kurang lebih Rp 19 triliun," tutur Dadan.

Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Deputy Bidang

Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,12% berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan siang gratis yang nilainya luar biasa, itu masuk ke dalam pasar, dan faktanya itu memutar roda perekonomian, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," ucap Nurul seperti dilansir dari *Antara*, Rabu (13/8/2025).

Menurut dia, program MBG berhasil mengalihkan pengeluaran negara dari yang sebelumnya untuk mendanai kegiatan kementerian dan lembaga, menjadi pengeluaran di pasar untuk memberi makan anak-anak. Menurutnya, Program MBG merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melawan korupsi.

Nurul meyakini, yang selama ini terjadi adalah korupsi dalam program-program di kementerian dan lembaga, yang menyebabkan pendanaan tertahan di kalangan koruptor. "Itu yang dilakukan presiden, hajar semua koruptor, jangan dikasih program supaya

enggak bisa korupsi. Uangnya kita pakai, masuk market, dan ekonomi tumbuh," kata Nurul.

Sekadar informasi, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada kuartal II 2025. Jika dilihat menurut lapangan usaha tercatat industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yaitu 18,67%. Industri pengolahan tumbuh 5,68% pada kuartal II 2025.

"Industri pengolahan tumbuh 5,68% karena didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri," ucap Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Selasa (5/8/2025).

Kinerja industri pengolahan disokong oleh industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,15%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti produk minyak mentah kelapa sawit, minyak goreng, dan makanan olahan lainnya.

Pada saat yang sama industri logam dasar tumbuh 14,91%

didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk besi dan baja. Sedangkan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,39%.

Keterlibatan UMKM

Di tempat terpisah, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengajak 29 juta pelaku UMKM ikut berperan aktif dalam Program MBG. Dengan terlibatnya UMKM, tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional, khususnya di sektor pangan. Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa MBG merupakan ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia.

"Dari total anggaran MBG, 85% dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, mulai dari sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan. Ini

adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan, untuk tumbuh dan berkembang," kata Riza di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Riza menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, penyedia jasa katering di tiap-tiap daerah, hingga pengolah limbah makanan yang memanfaatkan potensi ekonomi dari sisa bahan makanan menjadi produk pupuk pertanian, pakan ikan, hingga produk bernilai ekonomi lainnya.

Keberhasilan di sejumlah daerah membuktikan dampak positif program ini. Salah satunya di Pamulang, di mana seorang pemasok sayuran yang terhubung ke empat dapur MBG merekrut 15 ibu rumah tangga untuk membantu proses pengolahan sayuran, yang berarti membuka peluang kerja baru di tingkat lokal.

Meski peluangnya besar, Riza mengakui tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM beragam meliputi standarisasi kualitas,

kuantitas, dan kontinuitas pasokan, minimnya informasi teknis, serta keterbatasan akses pembiayaan

Kementerian UMKM pun telah menggelirkan program pendampingan terstruktur secara daring, meliputi sosialisasi, pelatihan, kurasi, business matching, hingga fasilitasi pembiayaan, yang diikuti oleh seribu pengusaha UMKM.

"Kami ingin memastikan setiap dapur MBG minimal 60% bahan bakunya berasal dari produk UMKM. Standar ini akan terus kami tingkatkan agar manfaat ekonomi dari program MBG dirasakan seluas mungkin oleh masyarakat, terutama pengusaha mikro," kata Riza.

Sebagai bentuk motivasi, Kementerian UMKM bersama Badan Gizi Nasional juga meluncurkan program "SPPG Ramah UMKM" bagi dapur penyelenggara MBG yang secara konsisten memprioritaskan produk UMKM. "Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan program MBG menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di pedesaan," kata Riza. **(es/b1/ant)**

